

LAMPIRAN XIII

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR TAHUN

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI



**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018-2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma – norma agama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah bertanggung jawab terhadap :

- a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat
- b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- c. Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
- d. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
- e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
- f. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau
- g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinkes adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

untuk periode lima (5) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bersifat indikatif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance (partisipatif, transparan dan akuntabel), serta menggunakan lima pendekatan perencanaan yaitu: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) pendekatan atas-bawah (top-down), dan (5) pendekatan bawah-atas (bottom-up).

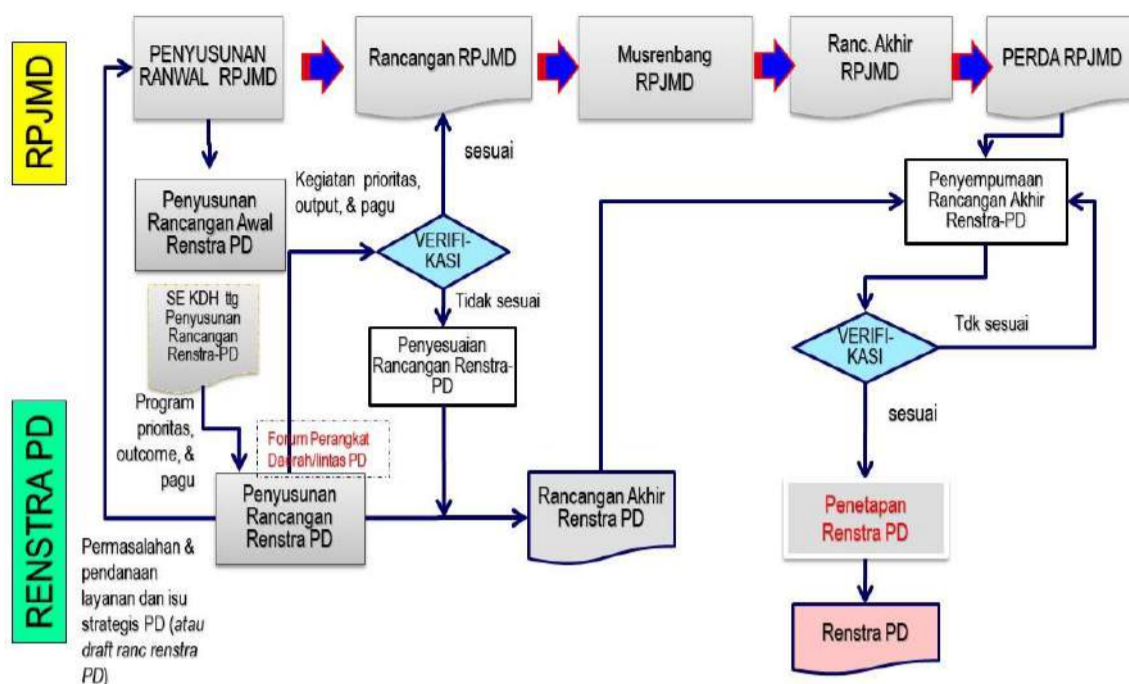
Dalam proses penyusunan renstra Dinas Kesehatan telah mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pasal 108 yang menyebutkan bahwa tata cara penyusunan renstra perangkat daerah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan renstra perangkat daerah;
- b. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah;
- c. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah;
- f. Penetapan renstra perangkat daerah.

Proses penyusunan Renstra perangkat daerah secara ringkas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Gambar 1.1 Tata cara penyusunan renstra



Memasuki tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan, terdapat KLB (Kejadian Luar Biasa) atau Pandemi COVID-19 yang menyebabkan Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan kebijakan untuk dilakukan Perubahan terhadap RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka Dinas Kesehatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di bawah lingkup Pemerintah Kota Bekasi harus melaksanakan perubahan terhadap Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

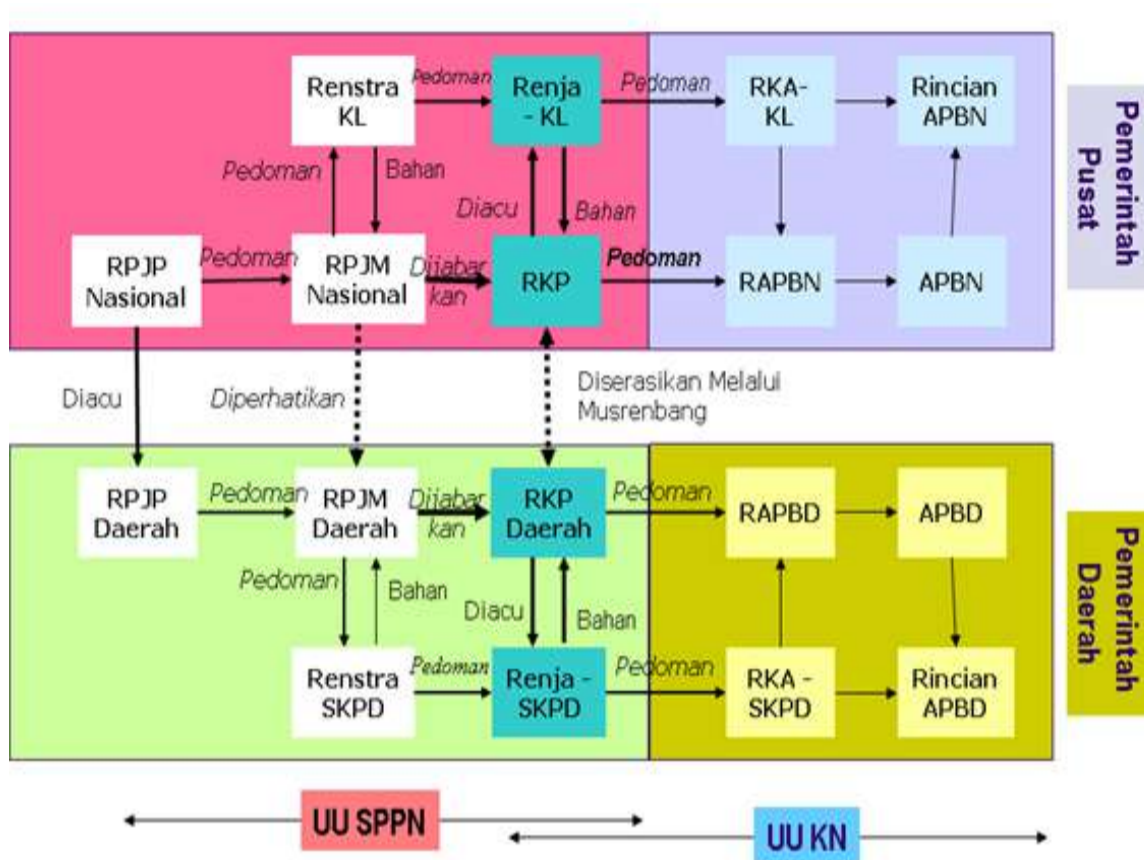
• Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Lain

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Dokumen Perencanaan



Dokumen Renstra Dinas Kesehatan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dokumen Renstra Dinas Kesehatan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, dan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Selain dokumen-dokumen perencanaan tersebut, perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Agenda Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs); dan (2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

- **Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMN**

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Renstra Dinas Kesehatan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Penyesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dalam Renstra Dinas Kesehatan adalah dengan memprioritaskan kegiatan sesuai dengan misi Presiden yaitu “ Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 dengan agenda pembangunan berupa Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta.

- **Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Renstra Kementerian Kesehatan**

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJMN. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat arah kebijakan pembangunan kesehatan dan indikasi rencana program kegiatan bidang kesehatan di setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dokumen Rencana Strategis tersebut menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

- **Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat**

Selain mengacu pada dokumen RPJMN, Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi Juga berkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Program, sasaran dan kegiatan yang ada di Provinsi Jawa Barat harus saling berhubungan sehingga tujuan pembangunan kesehatan yang ada di tingkat Provinsi dapat tercapai.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

- **Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Renstra Kabupaten Kota Lain**

Pemerintah Kota Bekasi merupakan daerah yang berbatasan dengan kabupaten kota lain yang memiliki karakteristik yang beragam. Wilayah yang berbatasan dengan Kota Bekasi antara lain Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Identifikasi isu strategis tersebut dituangkan dalam bentuk kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra.

- **Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD Kota Bekasi**

Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Bekasi disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif yang disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata kota Bekasi dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

- **Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RTRW Kota Bekasi**

Penyusunan Renstra memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kota sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam suatu daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

2011-2031 Rencana pengembangan sarana kesehatan meliputi : a. peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan; b. pengembangan lokasi Rumah Sakit Umum milik daerah sebagai lokasi sarana kesehatan utama, serta arahan pengembangan rumah sakit swasta dan khusus yang berlokasi di PPK serta SPPK dan koridor jalan kolektor primer; c. pengembangan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, dan pengembangan puskesmas pembantu disetiap kelurahan.

- **Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan KLHS Kota Bekasi**

Aspek lingkungan dalam penataan wilayah sangat penting. Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 15 dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi wajib membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan/atau program. Hasil KLHS harus menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 perlu disusun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kesehatan di Kota Bekasi dalam rangka mewujudkan visi Kota Bekasi yaitu “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, tentang : Hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NomoR 10);
 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 17. Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tatanan Kerja Pada dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 70 Seri D);
29. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 92 Seri D);
30. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 903/407/Bappelitbangda tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/ Jasa Sebagai Dampak Pandemi COVID-19 Melalui Refocussing Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah tersedianya pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan lingkungan strategis.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

1.3.2. Tujuan

Tujuannya disusunnya Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- b. Menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah dan menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel;
- c. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Disusun Dengan Sistematika Sebagai Berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan Secara Ringkas Tentang Latar Belakang Penyusunan Renstra Perubahan, Penjelasan Landasan Hukum Yang Menjadi Pedoman Sebagai Acuan Dalam Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah, Penjelasan Maksud Dan Tujuan Dari Penyusunan Renstra Serta Sistematika Penulisannya

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Memuat Informasi Tentang Peran (Tugas Dan Fungsi) Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Sumber Daya Yang Dimiliki Perangkat Daerah Dalam

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsinya, Mengemukakan Capaian-Capaian Penting Yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Dan RPJMD Periode Sebelumnya, Dan Mengulas Hambatan-Hambatan Utama Yang Masih Dihadapi Dan Dinilai Perlu Diatasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat Tentang Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kesehatan Nasional Dan Renstra Dinas Kesehatan Prov Jabar, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Serta Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tentang Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Tentang Rumusan Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Selama Tahun 2018 – 2023

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Penjabaran Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Yang Secara Langsung Menunjukkan Kinerja Yang Akan Dicapai Dalam Lima Tahun Mendatang Sebagai Komitmen Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan pentingnya Renstra Perubahan untuk menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Kesehatan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi

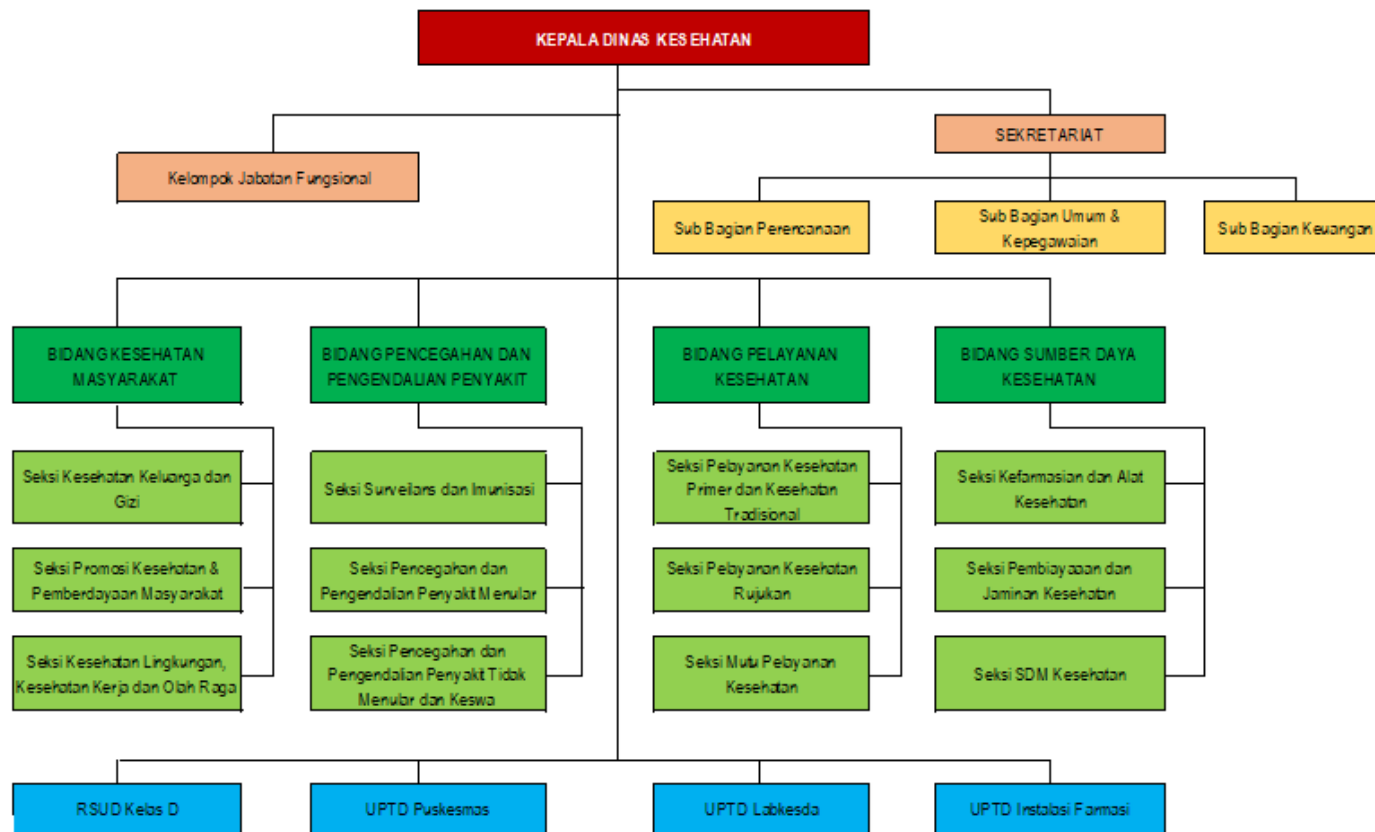
Dinas Kesehatan Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Peran Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi, dan tugas pembantuan meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.

Dalam menyelenggarakan peran sebagai dimaksud, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesehatan di daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, jaminan, dan sarana kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan peran tersebut diatas maka disusun struktur Dinas Kesehatan Kota Bekasi sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	



Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi, unsur organisasi Dinas terdiri atas :

- 1 Pimpinan adalah Kepala Dinas
- 2 Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian
- 3 Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sampai dengan Sekretariat dan Kepala Bidang adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kesehatan;
- pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang/Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- pembinaan administrasi perkantoran;
- pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang kesehatan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku
- penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Kepala Bidang

a. Sekteratiat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

- Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan dalam pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi surveillance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan fasilitasi dalam pelaksanaan surveillance dan imunisasi;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengelolaan, penyelenggaraan, pengoordinasian dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengendalian penyakit menular;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional dan perawatan kesehatan masyarakat untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengolahan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan primer;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional dan perawatan kesehatan masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

e. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

- Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penyusunan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kefarmasian;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, pengolahan dan analisa dalam pelaksanaan alat kesehatan dan sarana prasarana;
- Perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan, analisa, penyusunan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan sumber daya manusia kesehatan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala UPTD

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di lapangan dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD;
- b. pengawasan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan bawahan;
- c. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- d. pembinaan petugas operasional pada unit kerjanya;
- e. pemberian pelayanan terhadap masyarakat di bidang tugasnya;
- f. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
- g. fasilitasi pelaksanaan program kerja UPTD Puskesmas serta mengatur, mengarahkan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Unit Pelaksana Fungsional (UPF) dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPTD;
- i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga non Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unsur perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

m. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris dan secara teknis operasional kepada Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Dinas Kesehatan berjumlah 90 SOP dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Standar Operasional Prosedur Dinas Kesehatan

NO	NAMA SOP	SUB BAGIAN/SEKSI
1	Penyusunan Renstra	Sub Bagian Perencanaan
2	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP, LPPD & LKPJ)	
3	Penyusunan Rencana Kerja Awal	
4	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	
5	Menghimpun Standar Operasional Prosedur	
6	Layanan Pengaduan Masyarakat	
7	Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)	
8	Penyusunan Profil Kesehatan	
9	Pencatatan Siknas Online	
10	Penyusunan Rencana Kerja Akhir	
11	Rekapitulasi SP3	
12	Pelaksanaan Perbendaharaan Keuangan	Sub Bagian Keuangan
13	Pengadministrasian Dan Pembukuan Keuangan	
14	Penyusunan Pembuatan Daftar Gaji	
15	Pengusulan Tunjangan Daerah Serta Pembayaran Lainnya	
16	Penyusunan Kenaikan Gaji Berkala	
17	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18	Pengelolaan Pensiun	
19	Pengusulan Diklat PIM/ Teknis/ Fungsional	
20	Usulan Pemberian Penghargaan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
21	Pengendalian Naskah Dinas Masuk	
22	Pengendalian Surat Keluar	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
23	Pembuatan Berita Acara Perijinan Laboratorium Klinik	
24	Pembuatan Berita Acara Perijinan Optikal	
25	Penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik	
26	Penerbitan Izin Operasional Klinik	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
27	Penerbitan Surat Pengantar Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A&B	
28	Analisa Laporan Data Rumah Sakit	
29	Penerbitan Surat Persetujuan Direktur Rumah Sakit	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

NO	NAMA SOP	SUB BAGIAN/SEKSI	
30	Pelaksanaan Visitasi Rumah Sakit		
31	Penerbitan Rekomendasi Oprasional Unit Hemodelisa		
32	Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Izin Oprasional Klinik Utama		
33	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Berkas Izin Oprasional Klinik Utama		
34	Penerbitan Izin Oprasional Klinik Utama		
35	Penerbitan Rekomendasi Mendirikan Klinik Utama		
36	Penerbitan Rekomendasi Oprasional Unit Hemodelisa		
37	Penerbitan Rekomendasi Oprasional Unit Bank Darah		
38	Analisa Laporan Data Klinik Utama		
39	Pelacakan Kasus KIPI		Seksi Surveilans dan Imunisasi
40	Pengambilan Vaksin Dari Puskesmas Ke Dinas Kesehatan		
41	Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Jemaah Haji		
42	Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Di Puskesmas		
43	Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan		
44	Investigasi Penyakit Menyebabkan KLB		
45	Penyelidikan Epidemiologi		
46	Alur Laporan Kewaspadaan Dini Rs (KDRS) Kejadian Luar Biasa		
47	Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Saat Bencana		
50	Investigasi Penyakit Dapat Menyebabkan KLB		
48	Penanganan Balita Gizi Buruk	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	
49	Penanggulangan Penyakit DBD Dengan Pemberian Insektisida Untuk Pelaksanaan Fogging Fokus	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
51	Penerbitan Sertifikat Laik Hygine Sanitasi	Seksi Kesehatan Lingkungan	
52	Penerbitan Sertifikat Kursus Hygine Sanitasi		
53	Pemberian Rekomendasi Hasil Investigasi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Pengaduan Masyarakat	Seksi Kesehatan Lingkungan	
54	Pemberian Perintah Perbaikan Bagi Tempat Usaha Yang Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan		
55	Pemberian Rekomendasi Usaha Pest Control (Pembasmi Hama)		
56	Penerbitan Surat Izin Oprasional Perusahaan Pembasmi Hama		
57	Pengambilan Sample Dan Pengiriman Ke Laboratorium		
58	Inventirisasi SDM Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta	Seksi SDM Kesehatan	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

NO	NAMA SOP	SUB BAGIAN/SEKSI
59	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sdm Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan	Seksi SDM Kesehatan
60	Tatalaksana Tenaga Non PNS Di Lingkungan Dinas Kesehatan	
61	Pengelolaan Data SDM Kesehatan	
62	Tugas Belajar	
63	Izin Belajar	
64	Pelatihan Tenaga Kesehatan	
65	Penerbitan SIK & SIP Tenaga Kesehatan	
66	Penerbitan Sk Penetapan Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
67	Pelaksanaan Pembayaran Klaim Rumah Sakit Kepesertaan Kartu Sehat Dan SKTM	
68	Penerimaan Pengaduan Jaminan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar JKN	
69	Verifikasi Data Masyarakat Miskin Kota Bekasi	
70	Penerbitan Surat Jaminan Pelayanan	
71	Inventarisasi Data Pengguna Jaminan Kesehatan	Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
72	Penyusunan Daftar Usulan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	
73	Penyusunan Daftar Usulan Pengadaan Meubelair Dan Peralatan Kantor Di Lingkungan Dinas Kesehatan	
74	Penyusunan Data Kondisi Alat Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan	
76	Penyusunan Daftar Usulan Pembangunan/ Perbaikan Sarana/Bangunan Puskesmas/UPTD Dan Dinas Kesehatan	
77	Penyusunan Data Kondisi Bangunan Puskesmas/UPTD Dan Dinas Kesehatan	
	Penyusunan Data Kondisi Meubelair Dan Peralatan Kantor Di Lingkungan Dinas Kesehatan	
78	Monitoring Dan Evaluasi Sarana Dan Pralatan Kesehatan Di Puskesmas	
79	Pengadaan Alat Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan	
80	Perijinan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
81	Perijinan Apotek Dan Toko Obat	
82	Penyusunan Laporan Data Ketersediaan Obat Dan Vaksin	
83	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Obat Di Puskesmas	
84	Penutupan Apotek Dan Toko Obat	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

NO	NAMA SOP	SUB BAGIAN/SEKSI
85	Penyusunan Laporan Persediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas	Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
86	Penyusunan Laporan Data POR, PIO, Dan Penulisan Obat Generik Puskesmas	
87	Perijinan UKOT, PBF Cabang Dan PAK Cabang	

Salah satu fungsi Dinas Kesehatan adalah pemberian rekomendasi dan perijinan yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Jenis rekomendasi dan perijinan tersebut antara lain :

Tabel 2.2 Daftar Perijinan dan Non Perijinan dari Dinas Kesehatan

NO	NAMA PERIZINAN/NON PERIZINAN	DASAR PERATURAN
1	Rekomendasi Optik	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal
2	Rekomendasi Apotek	- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Apotek
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
3	Rekomendasi Toko Obat	- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2002 Tentang Pedagang Eceran Obat
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4	Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
5	Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
6	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
7	Rekomendasi pekerjaan tukang gigi	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi
8	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	- Peraturan Kepala Badan POM RI HK.03.I.23.04.12.2205. Tahun 2012
9	Rekomendasi Izin Rumah Sakit, Klinik	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
10	Berita Acara Hasil Pembinaan Kesehatan Tradisional (HATRA)	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
11	Rekomendasi Salon Kecantikan	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		- Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2011
12	Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (Pest Control)	- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Petisida
		- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Nomor 443.51/18.Kes.2/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Operasional Pemberantasan Hama (Pest Control)
13		- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Klinik

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

	Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik Pratama	- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 08 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 08 Seri E).
14	Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pratama	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Klinik - Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 08 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 08 Seri E).
15	Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik - Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 08 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 08 Seri E).
16	Rekomendasi Iin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang	- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1191/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 62 tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
17	Izin Toko Alat Kesehatan	- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1191/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 62 tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

		- Peraturan Walikota nomor 23 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan
18	Sertifikat Perusahaan Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1191/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan
		- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 70 tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
		- Peraturan Menteri Kesehatan nomor 62 tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
		- Peraturan Walikota nomor 24 tahun 2018 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kota Bekasi terdiri dari SDM yang ada lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Gudang Farmasi, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dengan rincian sebagai berikut :

a. Data SDM di Dinas Kesehatan

Jumlah SDM di Dinas Kesehatan adalah sebanyak 184 orang dengan tenaga PNS sebanyak 103 orang dan tenaga TKK sebanyak 81 orang, dengan rincian PNS sebagai berikut :

Tabel 2.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan				Total
	II	III	IV	TKK	
L	4	26	1	34	65
P	4	61	7	47	119
Total	8	87	8	81	184

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.4 Data Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin dan Jabatan

Jenis Kelamin	Jabatan										Total
	Apoteker	Fungsional Umum	Ka UP TD	Ka bid	Kasi	Kasubag	Penyuluh Kesmas	Pranata Labkes	Sanitarian	Sekretaris	
L		57	1	1	4	2					65
P	2	95	1	3	8	1	2	5	1	1	119
Total	2	152	2	4	12	3	2	5	1	1	184

Tabel 2.5 Data Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin dan Pendidikan

Jenis Kelamin	Pendidikan						Total
	D3	D4	S1	S2	SLTA	SLTP	
L	21		24	5	14	1	65
P	36	4	56	10	13		119
Total	57	4	80	15	27	1	184

Tabel 2.6 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Pendidikan	Golongan				Total
	II	III	IV	TKK	
D3	3	20		34	57
D4		1		3	4
S1		43	4	33	80
S2		10	4	1	15
SLTA	5	13		9	27
SLTP				1	1
Total	8	87	8	81	184

Tabel 2.7 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan

Pendidikan	Jabatan										Total
	Apoteker	Fungsional Umum	Ka UP TD	Ka bid	Kasi	Kasubag	Penyuluh Kesmas	Pranata Labkes	Sanitarian	Sekretaris	
D3		53						3	1		57
D4		4									4
S1	2	64	1	2	7	1	2			1	80
S2		5	1	2	5	2					15
SLTA		25						2			27
SLTP		1									1
Total	2	152	2	4	12	3	2	5	1	1	184

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

b. Data SDM di Puskesmas

Jumlah SDM di Dinas Kesehatan adalah sebanyak 184 orang dengan tenaga PNS sebanyak 103 orang dan tenaga TKK sebanyak 81 orang, dengan rincian PNS sebagai berikut :

Tabel 2.8 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan						Total
	I	II	III	IV	PTT	TKK	
L	1	13	48	18		87	167
P	3	56	538	148	5	367	1117
Total	4	69	586	166	5	454	1284

Tabel 2.9 Data Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin dan Jabatan

Jenis Kelamin	Jabatan												Total
	Apoteker	Asisten Apoteker	Bidan	Dokter	Dokter Gigi	Fungsional umum	Nutrisionis	Penyuluh Kesehatan	Perawat	Peraawat Gigi	Pranata Lab	Sanitarian	
L		3		27	6	99			21	1	4	6	167
P	12	18	216	121	82	415	34	2	149	38	15	15	1117
Total	12	21	216	148	88	514	34	2	170	39	19	21	1284

Tabel 2.10 Data Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin dan Pendidikan

Jenis Kelamin	Pendidikan								Total
	D1	D3	D4	S1	S2	SD	SLTA	SLTP	
L		39	1	54	1	5	58	9	167
P	37	483	66	310	22	6	186	7	1117
Total	37	522	67	364	23	11	244	16	1284

Tabel 2.11 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Pendidikan	Golongan						Total
	I	II	III	IV	PTT	TKK	
D1		4	32			1	37
D3		39	251	1	4	227	522
D4		1	33	18		15	67
S1			161	132	1	70	364
S2			8	15			23
SD						11	11
SLTA	1	23	101			119	244
SLTP	3	2				11	16
Total	4	69	586	166	5	454	1284

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.12 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan

Pendi dikan	Jabatan												Total
	Ap ote ker	Asi ste n Ap ote ker	Bid an	Do kte r	Do kte r Gig i	Fu gsi ona l um um	nut risi oni s	Pe ny ulu h Ke sm as	Per aw at	Per aw at Gigi	Pran ata Lab	Sa nit ari an	
D1			35			2							37
D3		8	119			228	26		105	11	13	12	522
D4			48			16					1	2	67
S1	11	1	10	139	81	79	4	2	29		2	6	364
S2	1		2	9	7	2	1		1				23
Pendi dikan	Jabatan												Total
	Ap ote ker	Asi ste n Ap ote ker	Bid an	Do kte r	Do kte r Gig i	Fu gsi ona l um um	nut risi oni s	Pe ny ulu h Ke sm as	Per aw at	Per aw at Gigi	Pran ata Lab	Sa nit ari an	
SD						11							11
SLTA		12	2			160	3		35	28	3	1	244
SLTP						16							16
Total	12	21	216	148	88	514	34	2	170	39	19	21	1284

B. Sarana Prasarana

Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang membawahi UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah. Kondisi Aset Di Dinas Kesehatan berdasarkan laporan pemutakhiran data aset tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13. Kondisi Aset Tetap Dinas Kesehatan

NO	JENIS ASET	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT
1	Tanah dan Bangunan	1	1		
3	AC Split	13	13	-	-
4	Alat Kedokteran. Farmasi dan Kesehatan lainnya	415	415	-	-
5	Alat Rumah Tangga Lainnya	63		8	-
6	Alat Audio Visual	23	23	-	-
7	Lemari Besi	24	24	-	-
8	Lemari Kayu	15	-	15	-
9	Alat Penyimpanan Perlengkapan KantorLainnya (Tambahan)	2	-	1	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

NO	JENIS ASET	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT
10	Rak Besi/Metal	18	18	-	-
11	Kursi Rapat	27	13	14	-
12	Kursi Lipat	185	185	-	-
13	Sofa	6	6	-	-
14	Meja Kerja	92	46	46	-
15	Mesin Absensi	11	11	-	-
16	Mesin Ketik	5	5	-	-
17	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	10	8	-	2
18	Mobil Ambulance	4	2	-	2
19	Truck + Attachhment	1	-	-	1
20	Pick Up	1	1	-	-
21	Note Book	57	57	-	-
22	P.C Unit	55	55	-	-
23	Pompa Lain-lain	3	3	-	-
24	Printer	46	46	-	-
25	Lemari Es	3	3	-	-
26	Scanner	6	6	-	-
27	Sepeda Motor	39	26	-	13

Berdasarkan data tersebut rata rata kondisi aset Dinas Kesehatan Sebagian masih dalam kondisi baik. Untuk aset yang rusak berat sudah diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang memiliki sarana kesehatan dasar yang terdiri dari Puskesmas , Puskesmas Pembantu dan Sarana Kesehatan lainnya dengan uraian sebagai berikut :

Sarana Kesehatan Dasar

a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk

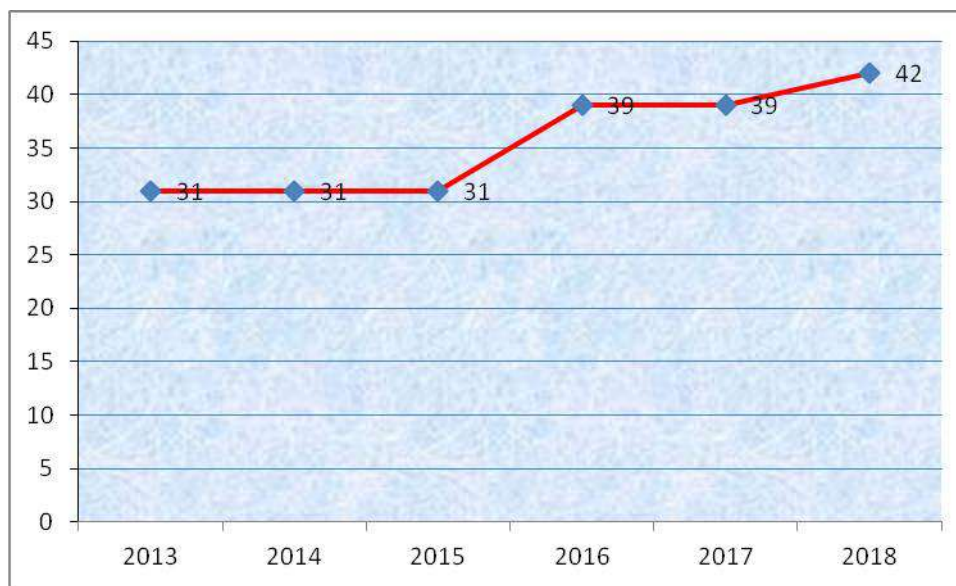
Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Pada tahun 2017 jumlah Puskesmas semakin meningkat menjadi 42 unit dari 39 unit pada tahun 2016. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah Puskesmas yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik 2.1.1

Jumlah Puskesmas di Kota Bekasi Tahun 2013 s.d. 2018



Sumber : Profil Kesehatan Kota Bekasi 2013-2018

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi dilakukan upaya peningkatan Puskesmas pembantu (Pustu) menjadi Puskemas dan peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas rawat inap seta peningkatan kemampuan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Tahun 2017 di Kota Bekasi terdapat 5 unit Puskesmas rawat inap dan PONED, 5 Puskesmas PONED, serta 32 unit Puskesmas non rawat inap.

b. Puskesmas Pembantu (Pustu)

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas didukung oleh sarana pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu). Jumlah Pustu pada tahun 2015 sebanyak 14 unit. Jumlah Pustu berkurang karena ada 8 Pustu yang ditingkatkan menjadi Puskesmas dan satu Pustu dipergunakan untuk pelayanan Puskesmas.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

- **Sarana Kesehatan Lainnya**

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/ sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.14
Distribusi Posyandu Menurut Puskesmas dan Stratanya
Di Kota Bekasi Tahun 2018

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU					POSYAN DU AKTIF
			PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI	JUMLAH	
1	Pondok Gede	Pondok Gede	-	-	53	12	65	65
		Jati Makmur	3	9	12	10	34	22
		Jati Bening	-	-	28	12	40	40
2	Pondok Melati	Jati Rahayu	-	5	22	4	31	26
		Jati Warna	-	4	38	9	51	47
3	Jati Sampurna	Jati Sampurna	-	28	26	11	65	37
		Jati Ranggon	-	-	13	15	28	28
4	Jati Asih	Jati Luhur	-	21	27	3	51	30
		Jati Asih	-	26	55	25	106	80
5	Rawa Lumbu	Bojong Rawalumbu	-	4	36	9	49	45
		Pengasinan	-	23	29	11	63	40
		Bojong Menteng	1	9	3	8	21	11
6	Bekasi Timur	Karang Kitri	-	27	13	8	48	21
		Wisma Jaya	-	-	40	7	47	47
		Aren Jaya	-	-	24	25	49	49
		Duren Jaya	-	-	42	7	49	49
7	Bekasi Selatan	Pekayon Jaya	-	5	17	10	32	27
		Jaka Mulya	2	10	8	2	22	10
		Jaka Setia	8	6	8		22	8
		Marga Jaya	1	10	8	10	29	18
		Perumnas II	-	-	11	36	47	47
8	Bekasi Utara	Seroja	-	-	26	10	36	36
		Perwira	-	4	17	-	21	17
		Kali Abang Tengah	-	29	12	3	44	15
		Marga Mulya	4	8	12	-	24	12
		Teluk Pucung	-	21	11	15	47	26
		Harapan Baru	-	9	3	7	19	10
9	Bekasi Barat	Rawa Tembaga	-	22	25	9	56	34
		Bintara Jaya	-	7	22	6	35	28
		Bintara	-	9	16	7	32	23
		Kranji	-	18	14	2	34	16
		Kotabaru	-	-	20	18	38	38
10	Medan Satria	Pejuang	-	1	26	55	82	81
		Kalibaru	-	-	3	48	51	51
11	Bantargebang	Bantargebang	-	4	25	9	38	34
		Ciketing Udik	-	-	7	2	9	9
12	Mustika Jaya	Mustika Jaya	-	22	14	13	49	27
		Cimuning	-	3	16	7	26	23
		Padurenan	-	12	5	9	26	14
JUMLAH KOTA BEKASI			19	356	787	454	1616	1241

Sumber : Profil Kesehatan Kota Bekasi 2013-2018

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.15 Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas

No.	Puskesmas		Kelengkapan (%)			Akumulasi
			Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	Cimuning	-	37,04	13,04	9,57	23,65
2	Perwira	-	55,56	8,7	11,32	33,18
3	Kalibaru	-	55,56	17,39	12,12	34,37
4	Harapan Baru	-	59,26	13,04	8,77	34,44
5	Jaka Setia	-	62,96	19,57	10,37	37,58
6	Ciketing Udik	-	62,96	21,74	11,32	38,18
7	Pedurenan	-	70,37	19,57	6,06	39,57
8	Jati Ranggal	-	77,78	23,91	9,41	45,04
9	Kranji	-	74,07	36,96	26,32	51,26
10	Jatimakmur	-	81,48	28,26	22,65	52,63
11	Jatisampurna	Ranap	74,29	51,06	26,19	52,73
12	Bintara	-	88,89	17,39	18,02	53,39
13	Perumnas Ii	-	81,48	36,96	34,13	58,09
14	Pekayon Jaya	-	88,57	23,4	30,68	58,9
15	Marga Mulya	-	100	15,22	18,98	59,11
16	Teluk Pucung	-	85,71	29,79	33,86	59,38
17	Pejuang	-	85,71	36,17	35,6	60,71
18	Karang Kitri	Ranap	97,14	31,91	23,15	61,02
19	Bintara Jaya	-	96,3	28,26	27,75	62,07
20	Bekasi Jaya	-	100	23,91	26,79	63,11
21	Pondok Gede	Ranap	94,29	29,79	33,29	63,44
22	Bojong Menteng	-	100	32,61	27,27	64,17
23	Marga Jaya	-	100	34,78	27,11	64,32
24	Duren Jaya	-	92,59	36,96	36,36	64,54
25	Rawa Tembaga	-	96,3	39,13	31,42	64,63
26	Kota Baru	-	100	43,48	26	64,75
27	Mustika Jaya	-	100	38,3	28,23	65,12
28	Jatirahayu	-	100	28,26	33,49	66,22
29	Pengasinan	-	100	39,13	30,94	66,29
30	Seroja	-	100	28,26	33,97	66,41
31	Jati Bening	-	100	45,65	30,46	66,75
32	Jatiwarna	-	96,3	41,3	38,28	67,59
33	Jati Luhur	-	100	36,96	36,68	68,37
34	Jaka Mulya	-	100	26,09	46,41	71,17
35	Bantar Gebang	Ranap	100	31,91	45,44	71,37
36	Aren Jaya	-	100	43,48	43,86	71,89
37	Kaliabang Tengah	-	100	39,13	46,89	72,67

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

No.	Puskesmas		Kelengkapan (%)			Akumulasi
			Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
38	Jati Asih	-	96,3	45,65	50,72	73
39	Bojong Rawa Lumbu	Ranap	100	46,81	64,83	80,61

Sumber : Aplikasi Aspak Kementerian Kesehatan

Dari data Aplikasi Aspak (Aplikasi Sarana dan Prasarana Kesehatan) dapat diketahui terdapat 8 Puskesmas yang persentase sarana, prasarana dan alat kesehatannya masih di bawah 50 persen yaitu Cimuning, Perwira, Kalibaru, Harapan Baru, Jaka Setia, Ciketing Udik, Pedurenan, Jati Ronggon. 8 Puskesmas tersebut disebabkan karena 8 Puskesmas tersebut merupakan Puskesmas baru yang sebelumnya adalah Puskesmas Pembantu sehingga semua sarana, prasarana alat kesehatan diambil dari Puskesmas Induk.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dilihat berdasarkan pada indikator 12 SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan 8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan selama 5 Tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	V		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	92,1	90,23	-	-	-	-	92	90,2
									%	%					4%	%					%	3%
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	V	v	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	87,9	87,71	-	-	-	-	88	87,7
									%	%					8%	%					%	1%
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan	%	V	v	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	97,2	95,69	-	-	-	-	97	95,6
									%	%					0%	%					%	9%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	pelayanan kesehatan sesuai standar																					
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	V		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	55,3	59,62	-	-	-	-	55	59,6
									%	%					2%	%					%	2%
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	V		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	96,0	94,67	-	-	-	-	96	94,6
									%	%					9%	%					%	7%
6	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	V		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	44,5	38,14	-	-	-	-	45	38,1
									%	%					9%	%					%	4%
7	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke	%	V		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	65,9	84,49	-	-	-	-	66	84,4
									%	%					0%	%					%	8%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar																					
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	V		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	9,15	13,30	-	-	-	-	9%	13,30%
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	V		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	37,6	30,49	-	-	-	-	38%	30,49%
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	V		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100%	100%
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	V	v	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	98,38	-	-	-	-	100%	98,38%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					Tahun ke-																	
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	V		-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	98,8	75,06	-	-	-	-	99	75,0
								%	%					0%	%					%	6%	
13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%		v	97	97%	97%	97%	98%	98%	84,9	94,6	96%	100	100	54,7	87,9	97,6	99	103	102	56,7
					%						4%	5%		%	%	%	%	%	%	%	%	%
14	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%		v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87,5	89,3	100	100	100	100	88	88
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
15	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%		v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100	100
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	%	%	%	%	%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
16	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	%		v	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	%		v	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Laporan SPM dan IKK Dinas Kesehatan Tahun 2013 s.d 2018

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Berdasarkan Hasil Capaian Indikator Kinerja yang tercantum dalam laporan SPM dan IKK Dinas Kesehatan dapat diketahui bahwa dari 13 indikator yang ada 4 indikator sudah mencapai target yaitu 100 persen, indikator tersebut antara lain adalah : Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD dan Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin.

Sedangkan indikator yang tidak mencapai target terdapat 11 Indikator yang belum mencapai target, indikator tersebut antara lain : Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Cakupan Desa/Kelurahan UCI, Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Selain Kinerja pelayanan pada Dinas Kesehatan dapat diketahui pula bagaimana Anggaran dan Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Kerangka Pendapatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut merupakan indikator yang menggambarkan kondisi keuangan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Daerah yang semakin membaik. Data Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan beserta realisasi dan rata rata pertumbuhan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2013 s.d 2018

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Daerah	4.816.402.400	39.860.366.000	53.739.680.002	53.139.210.980	53.061.594.405	56.753.287.000	4.482.890.600	41.847.359.000	54.033.619.032	1.870.839.300	52.681.495.427	50.768.447.859	0,93	1,05	1,01	0,04	0,99	0,89	11,78	11,32

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
Hasil Retribusi Daerah	1.130.480.000	687.686.000	687.783.002	87.613.580	0	0	880.870.700	876.135.800	953.790.000	991.703.500	0	0	0,78	1,27	1,39	11,3 2	0	0	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	3.685.922.400	39.172.680.000	53.051.897.000	53.051.597.400	53.061.594.405	56.753.287.000	3.602.019.900	40.971.223.200	53.079.829.032	879.135.800	52.681.495.427	50.768.447.859	0,98	1,05	1,00	0,02	0,99	0,89	15,40	14,09

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Daerah	195.909.397.414	198.436.827.570	209.108.407.341	358.053.332.445	521.878.942.232	743.827.032.775	181.710.417.143	149.828.657.233	234.250.485.247	311.890.330.168	476.818.777.601	693.183.894.765	0,93	0,76	1,12	0,87	0,91	0,93	3,80	3,81
Belanja Tidak Langsung	61.411.162.000	62.154.108.200	74.558.623.200	89.537.133.000	150.770.120.200	149.633.407.000	57.706.216.950	60.995.751.779	71.110.794.266	84.411.509.886	139.544.561.053	141.314.711.127	0,94	0,98	0,95	0,94	0,93	0,94	2,44	2,45

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	61.411.162.000	62.154.108.200	74.558.623.200	89.537.133.000	150.770.120.200	149.633.407.000	57.706.216.950	60.995.751.779	71.110.794.266	84.411.509.886	139.544.561.053	141.314.711.127	0,94	0,98	0,95	0,94	0,93	0,94	2,44	2,45
Belanja Langsung	134.498.235.414	136.282.719.370	134.549.784.141	268.516.199.445	371.108.822.032	594.193.625.775	124.004.200.193	88.832.905.454	163.139.690.981	227.478.820.282	337.274.216.548	551.869.183.638	0,92	0,65	1,21	0,85	0,91	0,93	4,42	4,45

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	65.803.925.000	6.138.548.700	79.859.001	89.537.133.000	150.770.120.200	164.201.457.000	61.822.733.950	5.396.561.000	75.440.830.066	84.411.509.886	139.544.561.053	152.924.091.627	0,94	0,88	944,68	0,94	0,93	0,93	2,50	2,47
Belanja Barang dan Jasa	67.742.455.914	115.252.273.838	126.246.939.350	146.540.304.554	189.331.717.069	409.509.040.175	62.033.990.073	77.785.445.354	80.403.813.391	123.617.173.152	174.648.598.757	389.991.495.121	0,92	0,67	0,64	0,84	0,92	0,95	6,05	6,29

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Modal	951.854.500	14.891.896.832	8.222.985.790	32.438.761.891	31.006.984.763	20.483.128.600	147.476.170	5.650.899.100	7.295.047.524	19.450.137.244	23.081.056.738	8.953.596.890	0,15	0,38	0,89	0,60	0,74	0,44	21,52	60,71

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2013 s.d 2018 dapat dikatehui bahwa Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengalami kenaikan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 dengan rata rata pertumbuhan untuk Anggaran sebesar 11,78 dan rata rata pertumbuhan untuk realisasi sebesar 1,72. Sedangkan untuk belanja tidak langsung yang berupa belanja pegawai terjadi kenaikan anggaran dengan rata rata kenikan untuk anggaran dan realisasi sebesar 2,44 dan 2, 45. Untuk belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal mengalami kenaikan dengan rata rata pertumbuhan anggaran sebesar 4,42 dan rata rata pertumbuhan realisasi sebesar 4,45.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatannya anggaran yang diperoleh bukan hanya dari anggaran APBD saja tapi juga berasal dari sumber dana lain. Anggaran Dinas Kesehatan berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18 Anggaran Dinas Kesehatan Berdasarkan Sumber Dana

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN		
		2015	2016	2017
ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:				
1	APBD KAB/KOTA	376,950,001,975	451,080,429,501	696,348,011,902
	a. Belanja Langsung	256,087,145,775	302,652,618,701	477,343,803,902
	- Dinas Kesehatan	54,790,764,000	89,537,133,000	145,988,922,000
	- RSUD	201,296,381,775	213,115,485,701	331,354,881,902
	b. Belanja Tidak Langsung	120,862,856,200	148,427,810,800	219,004,208,000
	- Dinas Kesehatan	74,558,623,200	96,536,038,799	126,508,178,000
	- RSUD	46,304,233,000	51,891,772,001	92,496,030,000
2	APBD PROVINSI	13,866,550,000	2,951,590,000	1,416,708,000
	- Banprov (Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran/ PBI)	13,842,000,000	2,951,590,000	1,416,708,000
	- Tugas Belajar D III	24,550,000		
	- Tugas Belajar S1	43,227,680		
3	APBN :	5,611,738,000	20,964,000,800	22,575,298,000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN		
		2015	2016	2017
	- (DAK) Pelayanan Kefarmasian	2,579,764,000	6,438,493,000	7,097,620,000
	- Dana Tugas Pembantuan Kab/ Kota (BOK)	3,031,974,000	6,479,000,000	12,127,147,000
4	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)	-	-	-
	(sebutkan project dan sumber dananya)	-	-	-
5	SUMBER PEMERINTAH LAIN (Silva)	67,683,693,048	82,499,337,646	85,241,684,432
	- Lain-lain (Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan utk Peserta JKN)	52,177,496,508	82,499,337,646	84,976,119,432
	Silva	15,506,196,540	-	265,565,000
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN		464,111,983,023	557,495,357,947	805,581,702,334
TOTAL APBD KAB/KOTA		4,188,655,800,274	4,171,774,790,571	5,186,116,074,099.22
% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA		11.08	13.36	15.53
ANGGARAN PER KAPITA		169,802.87	198,872.31	250,777.66

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran angggran kesehatan Kota Bekasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik yang bersumber dana APBD ataupun sumber dana lain (DAK Fisik, DAK Non Fisik dan JKN). Pemanfaatan anggaran di Puskesmas digunakan untuk membiaya operasional Puskesmas (Dana APBD), kegiatan promotif dan preventif dalam dan luar gedung (BOK) serta pengadaan sarana dan prasarana (Dana JKN).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bekasi

- **Analisis Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi**

Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi sangat erat kaitannya dengan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat pada Strategi pembangunan kesehatan pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan strategi pembangunan kesehatan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Strategi pembangunan kesehatan pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 meliputi: 1) Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas, 2) Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat, 3) Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 4) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas, 5) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas, 6) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan, 7) Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan, 8) Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, 9) Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 10) Memperkuat Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi, 11) Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, 12) Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan.

Sedangkan Strategi pembangunan kesehatan pada Renstra Provinsi Jawa Barat Kementerian Kesehatan Tahun 2013-2018 meliputi: 1) Memperkuat pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta penyehatan lingkungan. 2) Memperkuat pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi. 3) Penguatan pembiayaan dan sumber daya

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

kesehatan. 4) Penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi di bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan.

- **Analisis Telaahan Terhadap RTRW Terkait Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan**

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Faktor lingkungan yang dimaksud tidak terbatas pada lingkungan perumahan, tetapi juga termasuk lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan kimia dan lingkungan social ekonomi. Kebijakan perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas Wilayah Kota Bekasi diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031. Namun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemerintah Kota Bekasi masih kurang dari 30%. Rencana Perluasan ruang terbuka hijau ini harus diantisipasi oleh bidang kesehatan, sebagai lahan resapan air dan meminimalkan polusi udara dalam menghindari bencana alam seperti: banjir yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti: diare, ISPA, penyakit kulit, dan lain-lain.

- **Analisis Telaahan Terhadap terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**

Isu isu strategis yang tertuang dalam KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD berhubungan dengan isu isu pembangunan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Isu isu tersebut antara lain : Kuantitas dan Kualitas Air yang disebabkan oleh Kapasitas pengelolaan sampah , Alih Fungsi lahan/resapan air, Banjir dan Limbah kiriman, Pembuangan air limbah, Eksploitasi Air tanah, Kapasitas SPAM, Sistem/kapasitas utilitas Kota, Perilaku masyarakat, Topografi sangat datar, Porositas tanah Erosi yang akan berdampak pada munculnya masalah kesehatan.

Isu selanjutnya yang terkait adalah Penghidupan Masyarakat yang muncul akibat dari biaya tinggi, daya beli rendah, pelayanan kesehatan buruk dan rendahnya akses terhadap layanan dasar yang akan berdampak pada timbulnya masalah kesejahteraan social dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa analisis tersebut maka dapat diketahui tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. melihat analisis keadaan eksternal Dinas Kesehatan Kota Bekasi akan dapat diidentifikasi faktor

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

eksternal yaitu peluang dan tantangan yang mempengaruhi strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Faktor eksternal pada dasarnya adalah merupakan faktor yang ada di sekeliling Dinas Kesehatan Kota Bekasi, yang dapat terdiri atas kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban, lingkungan fisik, lingkungan hidup, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, demografi, stakeholders dan lain-lain.

Berdasarkan uraian dan telaah dari berbagai hal diatas, maka dapat diketahui tantangan dan peluang yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

a. Tantangan

1. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja;
2. Munculnya masalah kesehatan “Triple Burden“. Dimana terdapat Tiga beban penyakit yang merupakan permasalahan yang timbul dalam strategi untuk peningkatan pembangunan kesehatan yaitu:
 - a. Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular klasik, yaitu Tuberkulosis (TB), Kusta, Diare, DBD, Filarisiasi, Malaria, Leptospirosis, dll;
 - b. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (Non-Communicable Disease), yaitu Hipertensi, Diabetes Mellitus, Penyakit Kardiovaskuler (CVD), Ischemic Heart Disease, PPOK, Kanker, dll.
 - c. Munculnya penyakit baru (new emerging Infectious disease) yang antara lain dapat disebabkan oleh virus lama yang bermutasi, seperti HIV (1983), SARS (2003), Avian Influenza (2004), dan H1N1 (2009).
3. Masalah gizi di Indonesia masih sangat kompleks. Tidak hanya masalah kekurangan gizi seperti kondisi anak yang lambat pertumbuhannya / pendek (stunting) tetapi kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus ditangani dengan serius. Kondisi stunting (pendek) sendiri disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang secara maksimal, mudah sakit, maupun berdaya saing rendah.

b. Peluang

1. Komitmen Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang terwujud dalam penetapan visi, misi dan program kerja;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

2. Semakin bertambahnya alokasi anggaran kesehatan yang berasal dari berbagai sumber dana;
3. Ketersediaan fasilitas kesehatan swasta yang dapat berperan dalam pembangunan kesehatan;
4. Era Globalisasi sekarang ini kemajuan teknologi sangat berkembang dengan begitu pesat. Salah satu kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi ini merupakan salah satu solusi tepat bagi pemecahan masalah layanan publik;
5. penguatan aspek ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan gizi dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 13 Indikator yang belum mencapai target. Kesenjangan pada indikator yang tidak tercapai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Analisis GAP Capaian Indikator Pada Tahun 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Realisasi	GAP
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	90,23%	-10%
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	87,71%	-12%
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar	100%	95,69%	-4%
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	59,62%	-40%
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	94,67%	-5%
6	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	38,14%	-62%
7	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	84,49%	-16%
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	13,30%	-87%
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	30,49%	-70%
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	0%
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	98,38%	-2%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Realisasi	GAP
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	75,06%	-25%
13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98%	54,70%	-43%
14	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100%	89,30%	-11%
15	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	0%
16	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	100%	100%	0%
17	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin	100%	100%	0%

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kesejangan yang paling besar terdapat pada indikator Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 87%. Indikator selanjutnya adalah Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 70%. Indikator Ketiga yang tingkat kesenjangannya tinggi adalah Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 62% ketiga indikator tersebut berkaitan dengan permasalahan ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan yang masih rendah.

Proses penentuan identifikasi permasalahan selain dengan melihat pencapaian indikator Kinerja Dinas Kesehatan, perlu diperhatikan juga sasaran dari RPJMD Teknokratis yang berkaitan dengan Pembangunan Kesehatan. Dalam RPJMD teknokratis Pembangunan Kesehatan terdapat dalam Misi 4 yaitu Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Indikator Kesehatan yang terkait dengan pencapaian target kinerja di Misi 4 pada RPJMD adalah antara lain adalah :

A. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup merupakan salah satu 3(tiga) dimensi dasar pembangunan manusia yang dinyatakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI). Selama lima tahun ke belakang, Kota Bekasi memiliki capaian IPM yang sangat baik dan selalu berada di atas rata-rata nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Tabel 3.2 menunjukkan angka IPM

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Kota Bekasi, dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 3.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2013-2017

Wilayah	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bekasi	78,83	78,84	79,63	79,95	80,30
Jawa Barat	68,23	68,80	69,50	70,05	70,69
Indonesia	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : BPS Kota Bekasi

Sementara itu angka harapan hidup Kota Bekasi selama lima tahun ke belakang menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif, dimana pada tahun 2013 angka harapan hidup penduduk Kota Bekasi adalah 74,17 tahun sedangkan pada tahun 2017 angka harapan hidup penduduk Kota Bekasi adalah 74,63 tahun, dimana angka ini selalu lebih tinggi daripada angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.

Tabel 3.3 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bekasi, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2013-2017

Wilayah	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Bekasi	74,17	74,18	74,48	74,55	74,63
Jawa Barat	68,80	72,23	74,21	74,44	72,47
Indonesia	70,40	70,54	70,78	70,90	71,06

Sumber : BPS Kota Bekasi

B. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Angka kematian ibu, bayi dan balita merupakan indikator MDGs yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Indikator tersebut tidak dapat diukur oleh Dinas Kesehatan karena data kematian yang tercatat adalah data kematian berdasarkan laporan dan bukan merupakan hasil dari survey. Berikut ini adalah data kematian ibu, bayi dan balita di Kota Bekasi tahun 2013 s/d 2017 :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 3.4 Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Ibu di Kota Bekasi Tahun 2013 s/d 2017

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelahiran Hidup	46.180	46.961	49.168	46.919	47.065
Jumlah Kematian Ibu	29	22	14	14	11
Jumlah Kematian Bayi	48	41	76	48	52
Jumlah Kematian Balita	1	47	81	50	53
Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup	62,8	46,85	28,5	34,1	23,4
Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	1,04	0,87	1,55	1,02	1,10
Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	1,1	1	1,65	1,07	1,13

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan kematian ibu tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. Akan tetapi angka kematian bagi dan balita mengalami peningkatan di tahun 2017 dibanding tahun 2013 hal ini disebabkan karena autopsi verbal yang dilakukan di Puskesmas sudah dilaksanakan secara terpadu. Upaya penurunan kematian ibu, bayi dan balita harus ditingkatkan. Beberapa upaya penurunan kematian ibu, bayi dan balita yang telah dilakukan antara lain melalui pelayanan kesehatan yang diprioritaskan pada pelayanan promotif dan preventif dengan tetap melakukan pelayanan kuratif dan rehabilitatif antara lain peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan status gizi balita dan imunisasi.

C. Pneumonia Balita

Pneumonia adalah Infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Pneumonia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia terutama pada Balita. Menurut data profil kesehatan Indonesia tahun 2016, pneumonia merupakan pembunuh nomor dua pada Balita (16%) setelah diare (40%).

Menurut WHO, angka kesakitan pneumonia pada balita adalah 10%. Berikut ini adalah data prevalensi pneumonia balita di Kota Bekasi Tahun 2013 s/d 2017 :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 3.5 Morbiditas Akibat Pneumonia di Kota Bekasi Tahun 2013 s/d 2017

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Junlah Kasus Pneumonia	6.408	5.660	6.352	5.033	4.561
Jumlah Balita	266.525	266.299	254.004	260.989	281.895
Insidence Rate Pneumonia (per 1000 balita)	24,04	21,29	25,0	19,3	18,1

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa incidence rate (IR per 1000 balita) kasus pneumonia balita berfluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh penemuan kasus secara dini yang dapat ditemukan bagi di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat.

D. Diare

Data IR diare di Kota Bekasi tahun 2013 adalah 18,66 per 1000 penduduk turun menjadi 6,1 per 1000 penduduk pada tahun 2017. Berikut ini data kesakitan akibat diare di Kota Bekasi Tahun 2013 s/d 2017 :

Tabel 3.6 Morbiditas Akibat Diare di Kota Bekasi Tahun 2013 s/d 2017

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus Diare	49.736	28.794	37.370	22.626	17.462
Jumlah Penduduk	2.592.829	2.663.011	2.733.240	2.803.283	2.873.484
Insidence Rate Diare (per 1000 Penduduk)	18,66	10,81	13,67	8,07	6.1

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2013-2017

E. HIV-AIDS

Tingkat risiko penyebaran HIV – AIDS di Kota Bekasi semakin meningkat seiring dengan mobilitas penduduk antar wilayah yang semakin tingginya, makin berkembangnya sentra-sentra pembangunan, adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya terutama suntikan.

Kota Bekasi menyumbang cukup besar terhadap penularan HIV-AIDS di Jawa Barat. Kota Bekasi menduduki urutan kedua terbanyak kasus HIV-AIDS setelah Kota Bandung. Data kasus HIV dan AIDS setiap tahun fluktuatif. Tingginya

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

kasus HIV dan AIDS menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan faktor resiko yang menyebabkan penularan kasus. Kondisi ini perlu disikapi dengan strategi pengendalian HIV saat ini dilaksanakan dengan memadukan pencegahan, perawatan, dukungan serta pengobatan.

Tabel 3.7 Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Bekasi Tahun 2013 s/d 2017

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kasus HIV	401	317	310	615	310
Jumlah Kasus AIDS	123	133	155	168	155

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2013-2017

F. Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan bayi baru lahir menunjukkan status gizi bayi. Bayi dikatakan BBLR apabila berat badan bayi < 2.500 gram. BBLR berhubungan dengan kematian bayi. Selain itu bayi BBLR memiliki resiko pada tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Data BBLR tahun 2013 s/d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8 Data Bayi BBLR di Kota Bekasi Tahun 2013 s/d 2017

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah BBLR	187	260	428	163	335
Jumlah Lahir Hidup	46180	46961	49,168	46919	47065
%BBLR	0,40	0,55	0,9	0,3	0,7

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2013-2017

G. Status Gizi

Status gizi juga berakibat langsung maupun tidak langsung pada angka kesakitan dan kematian serta gangguan-gangguan lain yang dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anak yang kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan sehingga mempengaruhi status kesehatannya di kemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal juga digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Dewasa ini di Kota Bekasi tidak hanya menghadapi masalah balita kurang gizi, tetapi kasus balita kelebihan gizi juga makin banyak. Berikut disajikan prevalensi pendek, kurus, sangat kurus, gizi buruk, dan gemuk pada balita di Kota Bekasi Tahun 2013 dan Tahun 2017.

Tabel 3.9 Prevalensi Pendek, Kurus, Sangat Kurus, Gizi Buruk, dan Gemuk pada Balita di Kota Bekasi Tahun 2013 s.d 2017

Indikator	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Balita Pendek	14,80	13,63	12,18	11,29	11,75
Kurus	5,22	4,24	3,61	3,4	3,4
Sangat Kurus	0,19	0,16	0,13	0,2	0,2
Gizi Buruk	0,66	0,45	0,35	0,36	0,37
Gemuk	9,29	9,92	9,17	9,18	9,18

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2013-2017

Tabel diatas memperlihatkan bahwa telah terjadi penurunan balita kurang gizi, yang meliputi pendek, kurus, sangat kurus, maupun gizi buruk, demikian juga prevalensi balita gemuk. Data tersebut juga membuktikan bahwa Kota Bekasi telah mengalami *double burden*, yaitu selain mengalami masalah kurang gizi juga mengalami masalah kelebihan gizi.

Prevalensi balita pendek (*stunting*) dan gemuk jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus gizi buruk maupun sangat kurus. Tingginya prevalensi balita pendek sangat erat kaitannya dengan kejadian gizi buruk (BB/U). Sebagian besar balita gizi buruk (BB/U) disebabkan balita tersebut pendek, sebagaimana data PSG-Kadarzi tahun 2009 yang menyebutkan bahwa 78% balita yang gizi buruk adalah pendek.

Berdasarkan capaian indikator yang sudah diperoleh, maka dilakukan langkah selanjutnya dengan menentukan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan. Faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) organisasi. Faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

**Tabel 3.10 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan Kota**

Aspek Kajian	Faktor Yang Mempengaruhi	Identifikasi Faktor
Tupoksi Dinas Kesehatan	a. Internal	<p>1. Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan. ✓ Kompetensi SDM cukup ✓ Inovasi program unggulan untuk layanan kesehatan ✓ Kebijakan penatalaksanaan untuk percepatan dan/atau perbaikan layanan kesehatan ✓ Sarana prasarana operasional kesehatan yang memadai ✓ Anggaran untuk pelayanan kesehatan ✓ Tim Gerak Cepat diseluruh wilayah puskesmas dalam upaya penanggulangan bencana ✓ Laboratorium kesehatan milik Pemerintah Kota <p>2. Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah SDM Kurang memenuhi standar Penataan bangunan di beberapa puskesmas belum sesuai standar ✓ Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal ✓ Laboratorium kesehatan daerah belum terakreditasi sehingga belum terstandarisasi
	b. Eksternal	<p>1. Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dukungan masyarakat dalam implementasi program kesehatan ✓ Dukungan organisasi akademisi, instansi swasta dan LSM serta organisasi profesi dalam implementasi program kesehatan ✓ Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Aspek Kajian	Faktor Yang Mempengaruhi	Identifikasi Faktor
		<p>peningkatan pelayanan termasuk sistem informasi perijinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dukungan Pemerintah Pusat dalam regulasi pelayanan kesehatan dan perijinan bidang kesehatan ✓ Dukungan SKPD lain ✓ Kebijakan Kepala Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana ✓ Kondisi geografis kota Bekasi memudahkan dalam penanganan bencana <p>2. Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyakit akibat mobilitas penduduk ✓ Kondisi sosial, ekonomi dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan hidup bersih dan sehat dan perilaku yang berpotensi menimbulkan bencana ✓ Sinkronisasi regulasi terkait dengan perizinan ✓ Fasilitas kesehatan yang tidak berizin ✓ Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahan-bahan makanan yang sehat ✓ Adanya produk-produk yang beredar yang belum bersertifikat dan sesuai standar kesehatan

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, maka secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan kesehatan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 3.11 Analisis Masalah dan Akar Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Kesehatan lingkungan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dengan perilaku hidup bersih dan sehat; • Pencegahan penyakit akibat dampak dari kualitas lingkungan, perilaku konsumsi serta jenis makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Pengetahuan masyarakat • Kurangnya sarana Informasi tentang Penyakit
2	Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan; • Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, ibu dan lansia; • Efektivitas pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional; • Pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan; • Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya serta penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai • Anggapan masyarakat bahwa rumah sakit swasta lebih baik
3	Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama pengembangan bidang kesehatan dengan seluruh stakeholder ; • Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan 	Belum Semua Puskesmas Terakreditasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bekasi sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kesehatan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. VISI Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah: **“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN IHSAN ”**.

Untuk menggambarkan visi yang akan dicapai, maka perlu dilakukan perumusan misi yang menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdayasaing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kesehatan. Hal ini ditunjukkan melalui : Pernyataan **MISI Keempat yaitu “Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif”**.

Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan zaman. Hal ini merupakan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

penjabaran dari agenda ke-5 dari Nawa Cita, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”.

Pada misi ini ada beberapa program kerja yang memerlukan peran serta Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Penguatan sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;
2. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (perwujudan smart health);
3. Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);
4. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Tabel 3.12 Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

No	Program Kerja	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Penguatan sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional	Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan perlu ditingkatkan	Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan
2	Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (perwujudan smart health)	Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan	Perkembangan teknologi yang integrasi dari pusat kadang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah	Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan termasuk sistem informasi perijinan
3	Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial)	Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan perlu ditingkatkan	Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

4	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup dan Bersih	Tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi	Adanya dukungan masyarakat dalam implementasi program kesehatan
---	--	---	---	---

3.3. Telaahan Renstra K/L Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Bekasi tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai SKPD Tehnis bidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Kebijakan Kementerian Kesehatan berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi. Demikian pula untuk kebijakan Provinsi juga berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota. Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang ada di Kota Bekasi diharapkan berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan di tingkat Pusat dan Provinsi.

Tabel 3.13 Keselarasan Pokok-Pokok Tujuan dan Sasaran Pemerintah Pusat, Dinkes Prov Jabar Dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Pemerintah Pusat 2015-2019	Dinkes Prov. Jabar 2013-2018	Dinkes Kota Bekasi 2018-2023
<p>Pokok Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan status kesehatan masyarakat - Meningkatkan daya tanggap dan perlindungan masyarakat bidang kesehatan <p>Pokok Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, akses dan mutu pelayanan kesehatan - Meningkatnya tata kelola , kompetensi dan sistem informasi kesehatan 	<p>Pokok Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mencapai kualitas lingkungan yang sehat serta Perilaku Hidup Bersih dan sehat - Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas - Terpenuhinya sumber daya kesehatan - Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan <p>Pokok Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat - Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan - Menurunnya ratio Kematian Ibu dan Bayi 	<p>Pokok Tujuan :</p> <p>Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berkualitas dan Berakhlak Mulia</p> <p>Pokok Sasaran :</p> <p>Tercapainya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat</p>

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Pemerintah Pusat 2015-2019	Dinkes Prov. Jabar 2013-2018	Dinkes Kota Bekasi 2018-2023
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular - Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar - Menuju universal coverage JPKM - Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan - Meningkatnya data kesehatan yang komprehensif 	

Berdasarkan telaah antara Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi dapat analisis beberapa hal yang dapat menghambat atau mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Tabel 3.14 Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra

No	Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Renstra KL			
	Meningkatnya kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup dan Bersih	Tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi	Adanya dukungan masyarakat dalam implementasi program kesehatan
	Meningkatnya tata kelola, kompetensi dan sistem informasi kesehatan	Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan	Perkembangan teknologi yang integrasi dari pusat kadang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah	Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan termasuk sistem informasi perijinan
2	Renstra Dinkes Kota Bekasi			
	Tercapainya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup dan Bersih	Tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi	Adanya dukungan masyarakat dalam implementasi program kesehatan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

No	Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat			
	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup dan Bersih	Tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi	Adanya dukungan masyarakat dalam implementasi program kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan Menurunnya ratio Kematian Ibu dan Bayi	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup dan Bersih	Tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi	Kebijakan penatalaksanaan untuk percepatan dan/atau perbaikan layanan kesehatan
	Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup dan Bersih	Tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi	Kebijakan penatalaksanaan untuk percepatan dan/atau perbaikan layanan kesehatan
	Meningkatkan sumber daya kesehatan sesuai dengan standar Menuju universal coverage JPKM	Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan perlu ditingkatkan	Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan
	Terwujudnya Regulasi dan kebijakan kesehatan	Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan perlu ditingkatkan	Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan
	Meningkatnya data kesehatan yang komprehensif	Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan	Perkembangan teknologi yang integrasi dari pusat kadang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah	Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan termasuk sistem informasi perijinan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas Wilayah Kota Bekasi diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031. Namun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemerintah Kota Bekasi masih kurang dari 30%. Rencana Perluasan ruang terbuka hijau ini harus diantisipasi oleh bidang kesehatan, sebagai lahan resapan air dan meminimalkan polusi udara dalam menghindari bencana alam seperti: banjir yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti, diare, ISPA, penyakit kulit, dan lain-lain. Secara geografi Kota Bekasi berada pada posisi 106°55'-107°55' Bujur Barat serta 6°7'-6°15' Lintang Selatan. Kondisi alam Kota Bekasi merupakan daerah daratan dengan kemiringan antara 0 – 2% dan ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut.

Tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagian besar lahan di Kota Bekasi digunakan untuk tempat tinggal dan usaha. Luas lahan pertanian di Kota Bekasi semakin berkurang. Luas lahan di Kota Bekasi yang diperuntukkan untuk lahan sawah hanya 3,15% dari luas Kota Bekasi, yaitu 505 Ha. Selebihnya merupakan lahan kering yang digunakan untuk bangunan dan halaman (15.072 Ha), kebun (4.285 Ha), dan sedikit yang digunakan untuk kolam (69 Ha).

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Faktor lingkungan yang dimaksud tidak terbatas pada lingkungan perumahan, tetapi juga termasuk lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan kimia dan lingkungan social ekonomi.

Berdasarkan kajian KLHS Kota Bekasi Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; Tujuan 14 melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan; dan Tujuan 15 pelestarian dan pemanfaatan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

berkelanjutan ekosistem daratan. Berikut rumusan isu strategis TPB pilar lingkungan di Kota Bekasi.

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis Dari Target TPB Belum Tercapai
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. • Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. • Rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
Tujuan 11 Menjadi Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak. • Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau • Pengguna moda transportasi umum di perkotaan • Belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor) • Limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota • Sampah perkotaan yang tertangani • Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir) • Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah • Dokumen penanggulangan bencana
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). • Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah padat dan B3 • Timbulan sampah yang didaur ulang • Pelayanan / Pengangkutan Sampah
Tujuan 13 Penanggulangan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Berdasarkan Isu strategis dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan adalah : rumah tangga yang

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak, limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota, serta orban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

Dari hasil telaah keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya yang terkait, maka diperoleh beberapa permasalahan yang kemungkinan akan menghambat pencapaian tujuan Pembangunan Nasional. Permasalahan tersebut antara lain :

- ✓ Pencegahan penyakit akibat dampak dari kualitas lingkungan, perilaku konsumsi serta jenis makanan.
- ✓ Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, ibu dan lansia;
- ✓ Efektivitas pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
- ✓ Pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan;
- ✓ Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya serta penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA.
- ✓ Kerjasama pengembangan bidang kesehatan dengan seluruh stakeholder ;
- ✓ Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan perlu ditingkatkan
- ✓ Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan
- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup dan Bersih
- ✓ Rencana Perluasan ruang terbuka hijau menyebabkan banjir yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti, diare, ISPA, penyakit kulit, dan lain-lain.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

- ✓ Kondisi lingkungan perumahan yang belum memiliki sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan, terutama masyarakat miskin.
- ✓ Peran status ekonomi berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga untuk upaya pencegahan dan pengobatan penyakit.

2. Penentuan Prioritas Masalah dengan sistem *Skoring* melalui *Focus Grup Discussion (FGD)*

Setelah permasalahan ditemukan maka dilakukan proses *Focus Grup Discussion (FGD)* antara Kepala Dinas Kesehatan dan para Pemangku Jabatan di lingkup Dinas Kesehatan untuk menentukan prioritas masalah.

Tabel 3.15 Skoring unuk Penentuan Prioritas Masalah

Masalah \ Kriteria	Tingkat Urgensi (U)	Tingkat Keseriusan (S)	Tingkat Perkembangan (G)	U x S x G	Prioritas
Pencegahan penyakit akibat dampak dari kualitas lingkungan, perilaku konsumsi serta jenis makanan.	4	4	3	11	3
Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, ibu dan lansia;	4	3	3	10	4
Masalah \ Kriteria	Tingkat Urgensi (U)	Tingkat Keseriusan (S)	Tingkat Perkembangan (G)	U x S x G	Prioritas
Efektivitas pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;	4	4	4	12	1
Pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan;	1	1	1	3	12
Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya serta penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA.	1	1	1	3	13
Kerjasama pengembangan bidang kesehatan dengan seluruh stakeholder ;	3	3	2	8	6
Ketersediaan, standarisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan perlu ditingkatkan	3	2	2	7	7
Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan serta sistem informasi kesehatan perlu ditingkatkan	4	3	4	11	2
Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup dan Bersih	3	3	3	9	5
Rencana Perluasan ruang terbuka hijau menyebabkan banjir yang dapat	2	2	2	6	8
	1	1	1	3	11

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

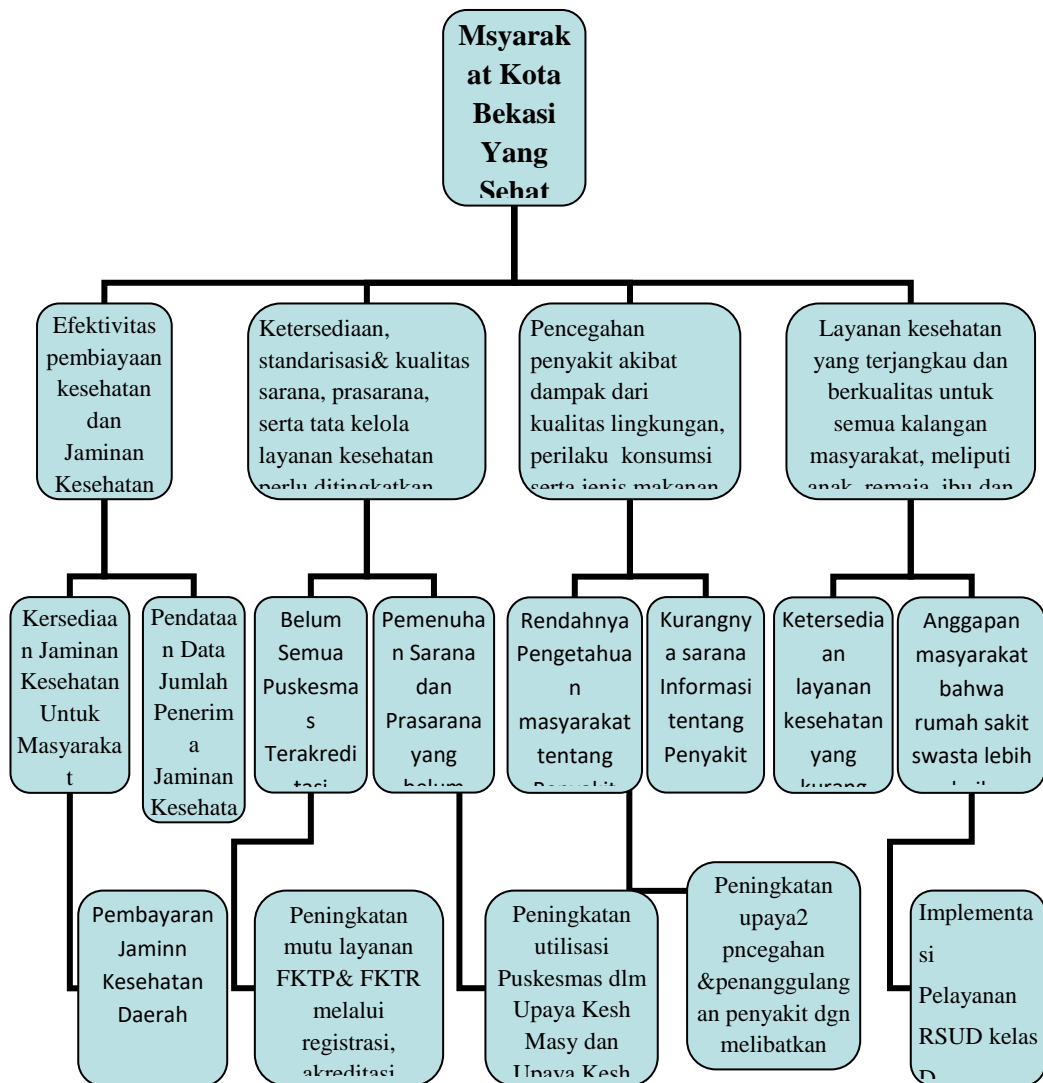
menimbulkan berbagai penyakit seperti, diare, ISPA, penyakit kulit, dan lain-lain.					
Kondisi lingkungan perumahan yang belum memiliki sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan, terutama masyarakat miskin.	2	2	1	5	9
Peran status ekonomi berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga untuk upaya pencegahan & pengobatan penyakit	2	1	1	4	10

3. Menentukan Prioritas Pemecahan Masalah yang merupakan Isu-Isu Strategis Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Setelah ditentukan prioritas masalah dengan sistem Skoring selanjutnya adalah menentukan akar permasalahan dan prioritas pemecahan masalah yang akan dijadikan isu isu strategis Renstra Dinas Kesehatan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Gambar 3.1 Penentuan Akar Permasalahan



Dari hasil penentuan akar permasalahan dapat diketahui beberapa isu-isu Strategis pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi, isu strategis tersebut antara lain adalah :

1. Pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah;
2. Peningkatan utilisasi Puskesmas dalam Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan;
3. Implementasi Pelayanan RSUD kelas D
4. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat;
5. Peningkatan mutu layanan FKTP dan FKTR melalui registrasi, akreditasi dan pemenuhan sumber daya kesehatan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan telaah dan analisis dari berbagai faktor, maka Tujuan Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Akuntabel
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi

4.2 Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga dapat digunakan sebagai alat pemicu bagi Perangkat Daerah terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Layanan Kesehatan
2. Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas kesehatan Kota Bekasi beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
Misi 1 : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik								
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Akuntabel		Nilai AKIP	66,28	70,05	73,25	75	77
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	66,28	70,05	73,25	75	77
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	78,61	80	80	80

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif								
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi		Usia Harapan Hidup	74,89 tahun	75,01 tahun	75,12 tahun	75,23 tahun	75,33 tahun
		1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat	1. Usia Harapan Hidup	74,89 tahun	75,01 tahun	75,12 tahun	75,23 tahun	75,33 tahun

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang selaras dengan Strategi dan Kebijakan Daerah serta Rencana Program Prioritas dalam RPJMD seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Peningkatankinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pengembangan Sumberdaya manusia kesehatan	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien melalui pelaksanaantugasdanfungsi sesuai proses bisnis dan pengembangan SDM Aparaturberbasiskompetensi
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui registrasi, akreditasidan pembentukan BLUD di Puskesmas dan rumah sakit

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Misi 4 : Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif Dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat	Meningkatkan sinergitas pembangunan bidang kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor terkait	1. Penguatan Fungsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			2. Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat
			3. Penguatan pembiayaan dan jaminan kesehatan
			4. Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Kesehatan
			5. Peningkatan upaya kesehatan lingkungan
			6. Peningkatan upaya kesehatan keluarga dan gizi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penetapan program dan kegiatan berdasarkan analisis dan metodologi perumusan yang telah dideskripsikan pada bagian sebelumnya. Dalam bagian ini diuraikan rencana program prioritas dan kegiatan dihubungkan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan maka Dinas Kesehatan Menetapkan Program Prioritas yang harus dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Program-program tersebut terbagi atas Program yang berkaitan dengan Belanja Langsung Penunjang Urusan dan Belanja Langsung Urusan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pemetaan program dan kegiatan yang lama mengikuti kodefikasi sesuai dengan peraturan yang terbaru.

Adapun uraian program prioritas dan kegiatan yang dihubungkan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket	
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
BIDANG KESEHATAN Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Akuntabel																					
				Nilai AKIP	63.49	66,28	53,154,620,000	70.05	65,625,000,000	73.25	77,048,700,000	75.00	90,529,484,800	77.00	101,608,163,280	77.00	387,965,968,080				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja			Nilai AKIP Perangkat Daerah	63.49	66,28	26,607,310,000	70.05	32,842,500,000	73.25	38,557,350,000	75.00	45,323,192,400	77.00	50,866,631,640	77.00	194,196,984,040				
		1	01				26,607,310,000		32,842,500,000		38,557,350,000		45,323,192,400		50,866,631,640		194,196,984,040				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	64,900,000	100%	67,100,000	100%	194,000,000				
		1	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	7 dok	20,000,000	7 dok	7 dok	22,000,000	7 dok	64,900,000	7 dok	67,100,000	7 dok	194,000,000				
		1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	2 Dok	2 Dok		2 Dok	2 Dok	42,900,000	2 Dok	42,900,000	2 Dok	85,800,000	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendap atan Asli Daerah (P A D)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket					
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
		1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersedia (LKIP, LKPJ, LPPD, SPM Kesehatan, Realisasi fisik dan keuangan)	5 Dok	5 Dok	20,000,000	5 Dok	5 Dok	20,000,000	5 Dok	22,000,000	5 Dok	22,000,000	5 Dok	24,200,000	5 Dok	108,200,000	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Persentase ketersediaan dokumen laporan keuangan		100%	100%	40,000,000	100%	100%	40,000,000	100%	44,000,000	100%	52,000,000	100%	58,000,000	#####				
		x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	4 dok	4 dok	40,000,000	4 dok	4 dok	40,000,000	4 dok	44,000,000	4 dok	52,000,000	4 dok	58,000,000	234,000,000				
		1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran	3 Dok	3 Dok	20,000,000	3 Dok	3 Dok	20,000,000	3 Dok	22,000,000	3 Dok	26,000,000	3 Dok	29,000,000	117,000,000	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.02	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	20,000,000	1 Dok	1 Dok	20,000,000	1 Dok	22,000,000	1 Dok	26,000,000	1 Dok	29,000,000	117,000,000	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan		12 bulan	247,385,903,200	12 bulan	300,000,000,000	12 bulan	330,000,000,000	877,385,903,200	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
							Indeks Kepuasan Masyarakat		76.61	77.61	26,547,310,000	78.61	80.00	32,782,500,000	80.00	38,491,350,000	80.00	45,206,292,400	80.00	50,741,531,640	193,768,984,040				
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang, jasa penunjang, pemeliharaan barang	100%	100%	26,547,310,000	100%	100%	32,782,500,000	100%	38,491,350,000	100%	45,206,292,400	100%	50,741,531,640	193,768,984,040				
		1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian	2 jenis	2 jenis	50,000,000	2 jenis	2 jenis	362,500,000	2 jenis	812,500,000	2 jenis	969,855,000	2 jenis	1,066,840,500	3,261,695,500				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
									Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang, jasa penunjang,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis					
		1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas	3 jenis	-	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dilatih	10 orang	10 orang	30 orang	37 orang	40 orang	42 orang	159 orang	159 orang	159 orang	159 orang	159 orang	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi Umum	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis					
		1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga					10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan pemenuhan logistik kantor					12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket			
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)									
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
		1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.215.950.400	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat Asli Daerah (P A D)				
		1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	385.000.000	88.000.000	385.000.000	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat Asli Daerah (P A D)			
		1	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah bulan fasilitasi makan minum tamu	12 bulan				12 bulan						700.000.000	400.000.000	700.000.000	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat Asli Daerah (P A D)			
		1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300.000.000	465.000.000	500.000.000	2.000.000.000	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat Asli Daerah (P A D)		
		1	01	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis SDKPD	12 bulan					12 bulan					175.000.000	100.000.000	175.000.000	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat Asli Daerah (P A D)			
		1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	0	0	0	191.250.000	200.375.000	391.625.000			
		1	01	01	2.07	06	Pengadaan mebel	Tersedianya mebel	1 Paket					1 Paket					100.000.000	100.000.000	200.000.000	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat Asli Daerah (P A D)			
		1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 Paket	1 Paket			1 Paket						91.250.000	100.375.000	191.625.000	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat Asli Daerah (P A D)			
		1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	25.332.850.000	30.650.000.000	35.715.000.000	40.857.000.000	45.942.700.000	178.497.550.000			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket						
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)												
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											
		1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat an Asli Daerah (P A D)	
		b	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pemenuhan gaji tenaga kerja kontrak	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat an Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis			
		1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat an Asli Daerah (P A D)
		x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat an Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapat an Asli Daerah (P A D)
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi								Usia harapan hidup	74,76	74,89	75,01	75,12	75,23	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33					
	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat							Usia harapan hidup	74,76	74,89	75,01	75,12	75,23	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33					

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket			
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)									
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp	
		1	01				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				715.241.727.325		640.430.950.059		666.371.558.369		766.354.933.833		711.089.077.216		3.534.488.246.802						
		1	01					Cakupan Pelayanan Dasar Di Puskesmas		100%	382.288.462.925	100%	290.896.942.459	100%	246.739.754.769	100%	215.370.067.833	100%	179.919.574.616	100%	1.315.214.802.602						
		1	01	01	2.10		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	382.288.462.925	30 jenis	290.896.942.459	30 jenis	246.739.754.769	30 jenis	215.370.067.833	30 jenis	179.919.574.616	30 jenis	1.315.214.802.602						
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Arenjaya)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	250.000.000	12 bulan	292.000.000	12 bulan	160.600.000	12 bulan	398.860.000	12 bulan	438.746.000	12 bulan	1.540.206.000	Aren Jaya	Aren Jaya, Bekasi Timur	Pendapat Asli Daerah (P A D)			
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Arenjaya)		12 bulan	1.347.668.750	12 bulan	1.347.668.750	12 bulan	1.848.587.775	12 bulan	1.750.918.800	12 bulan	1.926.010.690	12 bulan	8.220.854.755	Aren Jaya	Aren Jaya, Bekasi Timur	JKN				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket				
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)										
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Arenjaya)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Aren Jaya	Aren Jaya, Bekasi Timur	BOK
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bantargebang)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bantargebang	Bantargebang, Bantargebang	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bantargebang)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bantargebang	Bantargebang, Bantargebang	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bantargebang)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bantargebang	Bantargebang, Bantargebang	BOK
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bintara)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bintara	Bintara, Bekasi Barat	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bintara)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bintara	Bintara, Bekasi Barat	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bintara)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bintara	Bintara, Bekasi Barat	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket					
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)											
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp			
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bintara Jaya)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bintara Jaya	Bintara Jaya, Bekasi Barat	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bintara Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bintara Jaya	Bintara Jaya, Bekasi Barat	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bintara Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bintara Jaya	Bintara Jaya, Bekasi Barat	BOK
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bojong Menteng)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bojong Menteng	Bojong Menteng, Rawa Lumbu	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bojong Menteng)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bojong Menteng	Bojong Menteng, Rawa Lumbu	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bojong Menteng)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bojong Menteng	Bojong Menteng, Rawa Lumbu	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket					
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)											
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp			
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bojong Rawalumbu)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bojong Rawalumbu	Bojong Rawalumbu, Rawa Lumbu	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bojong Rawalumbu)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bojong Rawalumbu	Bojong Rawalumbu, Rawa Lumbu	JKN	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bojong Rawalumbu)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bojong Rawalumbu	Bojong Rawalumbu, Rawa Lumbu	BOK	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Duren Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Duren Jaya	Duren Jaya, Bekasi Timur	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Duren Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Duren Jaya	Duren Jaya, Bekasi Timur	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Duren Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Duren Jaya	Duren Jaya, Bekasi Timur	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jaka Mulya)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Jaka Mulya	Jaka Mulya, Bekasi Selatan	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jaka Mulya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Jaka Mulya	Jaka Mulya, Bekasi Selatan	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jaka Mulya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Jaka Mulya	Jaka Mulya, Bekasi Selatan	BOK
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Asih)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Jati Asih	Jati Asih, Jati Asih	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Asih)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Jati Asih	Jati Asih, Jati Asih	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Asih)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Jati Asih	Jati Asih, Jati Asih	BOK
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Bening)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Jati Bening	Jati Bening, Pondok Gede	Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)								
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Bening)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		Jati Bening	Jati Bening, Pondok Gede	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Bening)		12 bulan	12 bulan	471.000.000	12 bulan	471.000.000	12 bulan	471.000.000	12 bulan	471.000.000	12 bulan	518.100.000	12 bulan	2.402.100.000	Jati Bening	Jati Bening, Pondok Gede	BOK		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Luhur)		12 bulan	12 bulan	250.000.000	12 bulan	280.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	255.000.000	12 bulan	280.500.000	12 bulan	1.165.500.000	Jati Luhur	Jati Luhur, Jati Asih	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Luhur)		12 bulan	12 bulan	1.236.225.458	12 bulan	1.236.225.458	12 bulan	1.587.426.000	12 bulan	1.748.168.600	12 bulan	1.922.985.460	12 bulan	7.731.030.976	Jati Luhur	Jati Luhur, Jati Asih	JKN		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Luhur)		12 bulan	12 bulan	474.000.000	12 bulan	474.000.000	12 bulan	452.285.000	12 bulan	490.285.000	12 bulan	539.313.500	12 bulan	2.429.883.500	Jati Luhur	Jati Luhur, Jati Asih	BOK		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Makmur)		12 bulan	12 bulan	220.000.000	12 bulan	280.000.000	12 bulan	154.000.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	357.500.000	12 bulan	1.336.500.000	Jati Makmur	Jati Makmur, Pondok Gede	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Makmur)		12 bulan	12 bulan	1.481.342.650	12 bulan	1.481.342.650	12 bulan	1.521.589.200	12 bulan	1.521.589.200	12 bulan	1.673.748.120	12 bulan	7.679.611.820	Jati Makmur	Jati Makmur, Pondok Gede	JKN		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket			
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Makmur)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		Jati Makmur	Jati Makmur, Pondok Gede	BOK	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas		12 bulan	12 bulan	225.000.000	12 bulan	225.000.000	12 bulan	123.750.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	275.000.000	1.098.750.000	Jati Rahayu	Jati Rahayu, Pondok Melati	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas		12 bulan	12 bulan	1.673.649.700	12 bulan	1.673.649.700	12 bulan	1.885.129.500	12 bulan	1.885.129.500	12 bulan	2.073.642.450	9.191.200.850	Jati Rahayu	Jati Rahayu, Pondok Melati	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas		12 bulan	12 bulan	469.000.000	12 bulan	469.000.000	12 bulan	458.435.000	12 bulan	458.435.000	12 bulan	504.278.500	2.359.148.500	Jati Rahayu	Jati Rahayu, Pondok Melati	BOK
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Sampurna)		12 bulan	12 bulan	350.000.000	12 bulan	402.500.000	12 bulan	201.250.000	12 bulan	542.600.000	12 bulan	596.860.000	2.093.210.000	Jati Sampurna	Jati Sampurna, Jati Sampurna	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Sampurna)		12 bulan	12 bulan	2.401.120.050	12 bulan	2.401.120.050	12 bulan	2.683.809.000	12 bulan	2.683.809.000	12 bulan	2.952.189.900	13.122.048.000	Jati Sampurna	Jati Sampurna, Jati Sampurna	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Sampurna)		12 bulan	12 bulan	486.000.000	12 bulan	486.000.000	12 bulan	446.890.000	12 bulan	4.000.000.000	12 bulan	4.400.000.000	9.818.890.000	Jati Sampurna	Jati Sampurna, Jati Sampurna	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket	
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Warna)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Jati Warna	Jati Melati, Pondok Melati	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Warna)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Jati Warna	Jati Melati, Pondok Melati	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Warna)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Jati Warna	Jati Melati, Pondok Melati	BOK
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Kaliabang Tengah)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kali Abang Tengah	Kali Abang Tengah, Bekasi Utara	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Kaliabang Tengah)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kali Abang Tengah	Kali Abang Tengah, Bekasi Utara	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Kaliabang Tengah)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kali Abang Tengah	Kali Abang Tengah, Bekasi Utara	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket					
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Karang Kitri)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Karang Kitri	Margahayu, Bekasi Timur	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Karang Kitri)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Karang Kitri	Margahayu, Bekasi Timur	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Karang Kitri)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Karang Kitri	Margahayu, Bekasi Timur	BOK
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Kota Baru)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kotabaru	Kotabaru, Bekasi Barat	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Kota Baru)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kotabaru	Kotabaru, Bekasi Barat	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Kota Baru)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kotabaru	Kotabaru, Bekasi Barat	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket				
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)										
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Kranji)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kranji	Kranji, Bekasi Barat	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Kranji)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kranji	Kranji, Bekasi Barat	BOK
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Kranji)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Kranji	Kranji, Bekasi Barat	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Marga Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Marga Jaya	Marga Jaya, Bekasi Selatan	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Marga Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Marga Jaya	Marga Jaya, Bekasi Selatan	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Marga Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Marga Jaya	Marga Jaya, Bekasi Selatan	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)								
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Marga Mulya)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Marga Mulya	Marga Mulya, Bekasi Utara	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Marga Mulya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Marga Mulya	Marga Mulya, Bekasi Utara	JKN	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Marga Mulya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Marga Mulya	Marga Mulya, Bekasi Utara	BOK	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Mustika Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mustika Jaya	Mustika Jaya, Mustika Jaya	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Mustika Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mustika Jaya	Mustika Jaya, Mustika Jaya	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Mustika Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Mustika Jaya	Mustika Jaya, Mustika Jaya

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket					
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)											
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp			
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pejuang)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pejuang	Pejuang, Medan Satria	Pendapat Asli Daerah (P A D)		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pejuang)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pejuang	Pejuang, Medan Satria	JKN	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pejuang)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pejuang	Pejuang, Medan Satria	BOK	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pekayon Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pekayon Jaya	Pekayon Jaya, Bekasi Selatan	Pendapat Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pekayon Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pekayon Jaya	Pekayon Jaya, Bekasi Selatan	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pekayon Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pekayon Jaya	Pekayon Jaya, Bekasi Selatan	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)								
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target	Rp
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pengasinan)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		Pengasinan	Pengasinan, Rawa Lumbu	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pengasinan)		12 bulan	12 bulan	1.240.074.050	12 bulan	1.388.089.500	12 bulan	1.259.504.700	12 bulan	1.259.904.700	12 bulan	1.385.895.170	12 bulan	6.534.468.120	Pengasinan	Pengasinan, Rawa Lumbu	JKN		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pengasinan)		12 bulan	12 bulan	487.000.000	12 bulan	531.350.000	12 bulan	498.795.000	12 bulan	582.200.000	12 bulan	640.420.000	12 bulan	2.739.765.000	Pengasinan	Pengasinan, Rawa Lumbu	BOK		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Perumnas II)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	302.500.000	12 bulan	1.127.500.000	Perumnas II	Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Perumnas II)		12 bulan	12 bulan	1.152.503.050	12 bulan	1.152.503.050	12 bulan	1.304.538.900	12 bulan	1.304.538.900	12 bulan	1.434.992.790	12 bulan	6.349.076.690	Perumnas II	Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan	JKN		
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Perumnas II)		12 bulan	12 bulan	471.000.000	12 bulan	471.000.000	12 bulan	443.886.000	12 bulan	443.886.000	12 bulan	488.274.600	12 bulan	2.318.046.600	Perumnas II	Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan	BOK		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket				
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)										
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pondok Gede)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pondok Gede	Jati Waringin, Pondok Gede	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pondok Gede)	pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pondok Gede	Jati Waringin, Pondok Gede	JKN	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pondok Gede)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pondok Gede	Jati Waringin, Pondok Gede	BOK	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Rawa Tembaga)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rawa Tembaga	Jaka Sampurna, Bekasi Barat	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Rawa Tembaga)	pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rawa Tembaga	Jaka Sampurna, Bekasi Barat	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Rawa Tembaga)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Rawa Tembaga	Jaka Sampurna, Bekasi Barat	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket					
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)											
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Seroja)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Seroja	Harapan Jaya, Bekasi Utara	JKN	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Seroja)	pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Seroja	Harapan Jaya, Bekasi Utara	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Seroja)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Seroja	Harapan Jaya, Bekasi Utara	BOK	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Teluk Pucung)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Teluk Pucung	Teluk Pucung, Bekasi Utara	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Teluk Pucung)	layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Teluk Pucung	Teluk Pucung, Bekasi Utara	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Teluk Pucung)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Teluk Pucung	Teluk Pucung, Bekasi Utara	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket			
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)									
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bekasi Jaya)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bekasijaya	Bekasi Jaya, Bekasi Timur	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bekasi Jaya)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bekasijaya	Bekasi Jaya, Bekasi Timur	JKN
		1	01	01	2.10	01	Operasional Pelayanan Puskesmas (Bekasi Jaya)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Bekasijaya	Bekasi Jaya, Bekasi Timur	BOK
		1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Ciketing Udik)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Ciketing Udik	Ciketing Udik, Bantargebang	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Operasional Pelayanan Puskesmas (Ciketing Udik)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Ciketing Udik	Ciketing Udik, Bantargebang	JKN
							Operasional Pelayanan Puskesmas (Ciketing Udik)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Ciketing Udik	Ciketing Udik, Bantargebang	BOK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket			
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Cimuning)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	350.000.000	12 bulan	12 bulan	12 bulan	624.455.000	12 bulan	12 bulan	12 bulan	809.878.000	12 bulan	890.865.800	12 bulan	3.234.198.800	Cimuning	Cimuning, Mustika Jaya	Pendapat an Asli Daerah (P A D)
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Cimuning)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 bulan	499.930.935	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	709.930.935	Cimuning	Cimuning, Bantargeba ng	JKN
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Cimuning)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	462.000.000	508.200.000	12 bulan	12 bulan	12 bulan	446.044.000	12 bulan	12 bulan	12 bulan	446.044.000	12 bulan	490.648.400	12 bulan	2.352.936.400	Cimuning	Cimuning, Mustika Jaya	BOK
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Harapan Baru)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	300.000.000	345.000.000	12 bulan	12 bulan	12 bulan	379.500.000	12 bulan	12 bulan	12 bulan	497.526.000	12 bulan	547.278.600	12 bulan	2.069.304.600	Harapan Baru	Harapan Baru, Bekasi Utara	Pendapat an Asli Daerah (P A D)
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Harapan Baru)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	459.000.000	459.000.000	12 bulan	12 bulan	12 bulan	436.500.000	12 bulan	12 bulan	12 bulan	424.500.000	12 bulan	466.950.000	12 bulan	2.245.950.000	Harapan Baru	Harapan Baru, Bekasi Utara	BOK
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jaka Setia)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	230.000.000	276.000.000	12 bulan	12 bulan	12 bulan	509.300.000	12 bulan	12 bulan	12 bulan	738.020.000	12 bulan	811.822.000	12 bulan	2.565.142.000	Jaka Setia		Pendapat an Asli Daerah (P A D)
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jaka Setia)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	499.930.932	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	709.930.932	Jaka Setia		JKN

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jaka Setia)		12 bulan	12 bulan	463.000.000	12 bulan	463.000.000	12 bulan	435.380.000	12 bulan	609.532.000	12 bulan	670.485.200	12 bulan	2.641.397.200	Jaka Setia	Jaka Setia, Bekasi Selatan	BOK
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Ronggon)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi keehatan, layanan keehatan lingkungan, layanan keehatan keluarga, layanan keehatan gizi, layanan pencegahan dan	12 bulan	12 bulan	300.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	504.000.000	12 bulan	688.680.000	12 bulan	757.548.000	2.550.228.000	Jati Ronggon	Jati Ronggon, Jati Sampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Ronggon)	pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	N/A	12 bulan	N/A	12 bulan	499.930.932	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	709.930.932	Jati Ronggon	Jati Ronggon, Jati Sampurna	JKN	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Ronggon)		12 bulan	12 bulan	463.000.000	12 bulan	328.335.000	12 bulan	492.749.000	12 bulan	501.713.000	12 bulan	551.884.300	2.337.681.300	Jati Ronggon	Jati Ronggon, Jati Sampurna	BOK	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Kalibaru)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi keehatan, layanan keehatan lingkungan, layanan keehatan keluarga, layanan keehatan gizi, layanan pencegahan dan	12 bulan	12 bulan	262.852.000	12 bulan	386.986.000	12 bulan	425.684.600	12 bulan	450.684.600	12 bulan	495.753.060	2.021.960.260	Kalibaru	Kalibaru, Medan Satria	Pendap atan Asli Daerah (P A D)	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Kalibaru)	pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	1.786.882.900	12 bulan	1.786.882.900	12 bulan	499.930.932	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	4.283.696.732	Jati Ronggon	Kalibaru, Medan Satria	JKN	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Kalibaru)		12 bulan	12 bulan	462.000.000	12 bulan	426.620.000	12 bulan	437.610.000	12 bulan	437.610.000	12 bulan	481.371.000	2.245.211.000	Kalibaru	Kalibaru, Medan Satria	BOK	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket	
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Padurenan)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kehatan, layanan kehatan lingkungan, layanan kehatan keluarga, layanan kehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	230.000.000	12 bulan	253.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	745.000.000	12 bulan	819.500.000	12 bulan	2.647.500.000	Padurenan	Padurenan, Mustika Jaya	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Padurenan)		12 bulan	12 bulan	N/A	12 bulan	N/A	12 bulan	499.930.932	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	709.930.932	Padurenan	Padurenan, Mustika Jaya	JKN		
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Padurenan)		12 bulan	12 bulan	465.000.000	12 bulan	465.000.000	12 bulan	449.730.000	12 bulan	494.703.000	12 bulan	544.173.300	2.418.606.300	Padurenan	Padurenan, Mustika Jaya	BOK		
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Perwira)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kehatan, layanan kehatan lingkungan, layanan kehatan keluarga, layanan kehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	270.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	385.000.000	12 bulan	525.500.000	12 bulan	578.050.000	2.108.550.000	Perwira	Perwira, Bekasi Utara	Pendap atan Asli Daerah (P A D)		
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Perwira)		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan	499.930.932	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	709.930.932	Perwira	Perwira, Bekasi Utara	JKN		
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Perwira)		12 bulan	12 bulan	461.000.000	12 bulan	461.000.000	12 bulan	445.664.000	12 bulan	445.664.000	12 bulan	490.230.400	2.303.568.400	Perwira	Perwira, Bekasi Utara	BOK		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Mustika Sari)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	250.000.000	12 bulan	346.987.080	12 bulan	380.000.000	12 bulan	525.000.000	12 bulan	577.500.000	2.079.487.080	Mustika Sari	Mustika Sari, Mustika Jaya	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Mustika Sari)	layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan	12 bulan	12 bulan	459.000.000	12 bulan	459.000.000	12 bulan	423.376.000	12 bulan	466.576.000	12 bulan	513.233.600	2.321.185.600	Mustika Sari	Mustika Sari, Mustika Jaya	BOK	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Sumur Batu)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan	12 bulan	12 bulan	250.000.000	12 bulan	252.500.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	425.000.000	12 bulan	467.500.000	1.795.000.000	Sumur Batu	Sumur Batu, Bantargebang	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Sumur Batu)	layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan	12 bulan	12 bulan	459.000.000	12 bulan	459.000.000	12 bulan	421.166.000	12 bulan	421.166.000	12 bulan	463.282.600	2.223.614.600	Sumur Batu	Sumur Batu, Bantargebang	BOK	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jatibening Baru)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan	12 bulan	12 bulan	230.000.000	12 bulan	253.000.000	12 bulan	278.300.000	12 bulan	303.300.000	12 bulan	333.630.000	1.398.230.000	Jati Bening Baru	Jati Bening Baru, Pondok Gede	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jatibening Baru)	layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan	12 bulan	12 bulan	459.000.000	12 bulan	459.000.000	12 bulan	423.083.000	12 bulan	423.083.000	12 bulan	465.391.300	2.229.557.300	Jati Bening Baru	Jati Bening Baru, Pondok Gede	BOK	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Harapan Mulya)		Na	Na	Na	Na	12 bulan	200.000.000	12 bulan	525.740.000	12 bulan	578.314.000	1.304.054.000	Harapan Mulya		Pendapatan Asli Daerah (P A D)		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Harapan Mulya)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na	Na	Na	Na	Na	12 bulan	500.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	1.050.000.000	Harapan Mulya		BOK	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Karya)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na			12 bulan	400.000.000	12 bulan	525.000.000	12 bulan	577.500.000	12 bulan	1.502.500.000	Jati Karya	Jati Karya, Jati Sampurna	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Karya)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na		Na	Na	278.304.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	440.000.000	12 bulan	1.118.304.000	Jati Karya	Jati Karya, Jati Sampurna	BOK	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Kramat)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na		Na	12 bulan	300.000.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	357.500.000	12 bulan	982.500.000	Jati Kramat	Jati Kramat, Jati Asih	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Kramat)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na	Na	Na	Na		12 bulan	320.300.000	12 bulan	352.330.000	12 bulan	672.630.000	Jati Kramat	Jati Kramat, Jati Asih	BOK	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Mekar)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na	Na	Na	12 bulan	200.000.000	12 bulan	225.000.000	12 bulan	247.500.000	12 bulan	672.500.000	Jati Mekar		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Jati Mekar)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na	Na	Na	Na		12 bulan	312.500.000	12 bulan	343.750.000	12 bulan	656.250.000	Jati Mekar		BOK	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket	
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Medan Satria)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na	Na	Na	Na	Na	12 bulan	200.000.000	12 bulan	525.740.000	12 bulan	578.314.000	12 bulan	1.304.054.000	Medan Satria	Medan Satria, Medan Satria	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Medan Satria)		Na	Na	Na	Na	Na	Na	12 bulan	500.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	1.050.000.000	Medan Satria	Medan Satria, Medan Satria	BOK		
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Cikiwul)	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na	Na	Na	Na	Na	12 bulan	425.000.000	12 bulan	467.500.000	12 bulan	892.500.000	Cikiwul	Cikiwul, Bantargeba ng	Pendap atan Asli Daerah (P A D)		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Jatimurni	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na		Na		Na				12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Jatimelati	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na		Na		Na				12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Jaticempaka	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na		Na		Na				12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Jatirangga	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na		Na		Na				12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Jatiraden	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na		Na		Na				12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Jatisari	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na		Na		Na				12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket	
									Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)							
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
						Operasional Pelayanan Puskesmas Jatirasa	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na		Na		Na				12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000				
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sepanjangjaya	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk layanan promosi kesehatan, layanan kesehatan lingkungan, layanan kesehatan keluarga, layanan kesehatan gizi, layanan pencegahan dan pengendalian penyakit, layanan UKM pengembangan dan layanan sistem informasi di Puskesmas	Na	Na		Na		Na				12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000				
		1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Labkesda)	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan di Llabkesda	12 bulan	12 bulan	507.000.000	12 bulan	1.100.000.000	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	6.107.000.000	Labkesda	Kranji, Bekasi barat	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Jumlah sampel kesmas yang diperiksa di labkesda		1000 sampel		1500 sampel		4.307 sampel		4.307 sampel		4.307 sampel		4.307 sampel					
							Jumlah sampel klinik yang diperiksa di labkesda						450 sampel		450 sampel		450 sampel		450 sampel					
		1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Instalasi Farmasi)	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan di Instalasi Farmasi	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		595.484.420	12 Bulan	944.845.450	12 Bulan	1.039.329.995	12 Bulan	2.579.659.865	Instalasi Farmasi	Mustika Jaya, Mustika Jaya	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
							Jumlah bulan pelaporan melalui Aplikasi Logistik SIPO di Instalasi Farmasi	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan											

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
							Jumlah bulan Distribusi Obat ke Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan				12 Bulan									
		1	02	02	2,02	34	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, brmhp, makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah bulan Distribusi Obat ke Puskesmas				12 Bulan			12 Bulan									
		1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah peserta evaluasi kapasitas kesehatan olahraga pada petugas puskesmas						50 Orang	400.000.000	50 Orang	440.000.000	50 Orang	840.000.000	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		
							Jumlah peserta Orientasi guru UKS dalam pelaksanaan kebugaran anak sekolah						100 Orang		100 Orang		100 Orang	0						

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket				
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	RP							
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP							
												50 Orang		50 Orang		50 Orang	0							
												200 Orang		200 Orang		200 Orang	0							
												60 orang		60 orang		60 orang	0							
												10 pos		10 pos		10 pos	0							
												2 perusaha an		2 perusaha an		2 perusaha an	0							
												60 orang		60 orang		60 orang	0							
												60 orang		60 orang		60 orang	0							
												200 orang		200 orang		200 orang	0							
												60 orang		60 orang		60 orang	0							
		1	02	02	2,02	24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	42 Puskesmas	42 pkm		42 pkm	3.327.500.000	47 pkm	4.069.494.000	47 pkm	4.812.643.400	56 pkm	5.293.907.740	56 pkm	17.503.545.140	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
								Jumlah kelurahan tebentuk G1R1J (Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik) DBD				5 Kel		5 Kel		5 Kel		5 Kel		20 kel				
								Jumlah Perluasan Pembentukan PPM DOTS TB di Kecamatan	1 Kec	1 Kec		2 Kec		3 Kec		3 Kec		3 Kec		12 Kec				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)					
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP				
				Jumlah Perluasan Pembentukan TIM DOTS TBC di RS	3 RS	5 RS		5 RS		5 RS		5 RS		5 RS		18 RS			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
				Jumlah Perluasan Ketuk pintu TBC	500 KK	500 KK		500 KK		500 KK		500 KK		500 KK		2500 KK				
				Jumlah Perluasan layanan VCT	2 PKM	5 PKM		5 PKM		5 PKM		5 PKM		5 PKM		25 PKM				
				Jumlah Perluasan layanan PPIA/PMTCT	6 RS 5 PKM	6 RS 5 PKM		5 RS 5 PKM		5 RS 10 PKM		5 RS 10 PKM		5 RS 10 PKM		26 RS 40 PKM				
				Jumlah Perluasan layanan CST/ Pembobatan ARV	5 RS 0 PKM	5 RS 2 PKM		5 RS 2 PKM		10 RS 2 PKM		10 RS 2 PKM		10 RS 2 PKM		40 RS 10 PKM				
				Jumlah Perluasan Kegiatan ICF(Intensif case Finding) Kusta	0 RS 2 PKM	1 RS 5 PKM		2 RS 5 PKM		2 RS 5 PKM		2 RS 5 PKM		2 RS 5 PKM		9 RS 25 PKM				
				Jumlah Faskes yang dilakukan pemantauan cold chain								94 Faskes		94 Faskes		94 Faskes				
				Jumlah Validasi data imunisasi puskesmas								2 kali		2 kali		2 kali				
				Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemantauan BIAS				95%				48 PKM		48 PKM		48 PKM				
				Jumlah petugas puskesmas yang dilatih imunisasi								48 orang		48 orang		48 orang				
				Jumlah RSUD Kelas D yang dilakukan Monev imunisasi								4 RSUD		4 RSUD		4 RSUD				
				Jumlah Kecamatan Peduli Penyakit (KECAPIT)								12 Kev		12 Kev		12 Kev				
				Jumlah laboratorium (Puskesmas dan Labkesda) yang melakukan pelayanan sesuai standar mutu dalam penegakan								48 Pkm 1 Labkesda		48 Pkm 1 Labkesda		56 Pkm 1 Labkesda				
				Jumlah pelayanan farmasi yang melakukan pelayanan sesuai standar mutu dalam program P2PM								48 Pkm 1 IF		48 Pkm 1 IF		56 Pkm 1 IF				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
							Jumlah faskes yang melaksanakan penanganan Covid 19						88 Faskes		88 Faskes		88 Faskes							
							Jumlah Posbindu PTM yang memberikan pelayanan skrining kesehatan usia produktif						34 Posbindu		34 Posbindu		34 Posbindu							
							Jumlah panti yang dilakukan edukasi pemantauan minum obat pasien ODGJ						7 panti		7 panti		7 panti							
		1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah posko penanganan pasca bencana	15 posko	15 posko	50.000.000	15 posko	200.000.000	15 posko		15 posko	200.000.000	220.000.000	15 posko	670.000.000	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
							Jumlah petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilatih penanganan masalah kesehatan korban bencana		60 orang	50.000.000	60 orang	200.000.000	60 orang		60 orang	200.000.000	220.000.000	60 orang	670.000.000	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		
							Jumlah kegiatan posko kesehatan pada kegiatan potensi bencana	12 event	12 event	50.000.000	12 event	200.000.000	12 event		12 event	200.000.000	220.000.000	12 event	670.000.000	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		
		1	02	02	2,02		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pengiriman sampel		100 sampel	280.000.000	100 sampel	500.000.000	100 sampel	218.450.000	100 sampel	300.000.000	330.000.000	100 sampel	1.628.450.000	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
							Jumlah pengambilan sampel		100 sampel		100 sampel		100 sampel		100 sampel		100 sampel							
							Jumlah penemuan dan penanganan KUPI		10 kasus		10 kasus		10 kasus		10 kasus		10 kasus							
							Jumlah penyelidikan epidemiologi pada penyakit potensial wabah		100 kali		100 kali		100 kali		100 kali		100 kali							
							Jumlah laporan rutin data surveilans		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan							
		1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Frekuensi pertemuan sinergitas dengan tim penyelenggara kesehatan haji puskesmas		2 kali	280.000.000	2 kali	500.000.000	2 kali	218.450.000	2 kali	300.000.000	.000.000	2 kali	3.450.000	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket				
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	RP							
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP							
								4000 orang		4000 orang		4000 orang		4000 orang		4000 orang								
								1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali								
												15 kloter		15 kloter		15 kloter								
												47 pkm		56 pkm		56 pkm								
												21 lokasi		21 lokasi		21 lokasi								
		1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Penyehat Tradisional dan salon kecantikan yang dibina					50 orang	100.000.000	50 orang	110.000.000	50 orang	210.000.000	Bidang Yankes	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)			
		1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	42 Puskesmas	42 PKM	300.000.000.000	42 PKM	200.000.000.000	47 PKM	150.000.000.000	48 PKM	100.000.000.000	56 PKM	50.000.000.000	56 PKM	800.000.000.000	Bidang Yankes	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Jumlah bulan ketersediaan obat penanganan KLB			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan						
							Jumlah bulan ketersediaan bahan habis pakai penanganan KLB			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan						
							Jumlah bulan ketersediaan operasional penanganan KLB			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan						
							Jumlah Alkes, sarana dan prasarana penanganan KLB			1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket						
							Jumlah bulan ketersediaan obat penanganan KLB			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan						
		1	02	02	2,02	19	Pengadaan dan Pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah alat yang dikalibrasi				1 paket	75.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	30.000	1 paket	30.000	Bidang Yankes	Harapan Mulya, Medan	Pendapatan Asli Daerah		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket				
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)										
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
		1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Jenis layanan informasi					1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis									
		1	02	02	2,03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah profil kesehatan					1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	600.000.000								
								Jumlah sarana pengelolaan data					1 paket		1 paket		1 paket		1 paket									
								Jumlah bulan pengelolaan logistik dalam pelayanan kefarmasian					1 paket		1 paket		1 paket		1 paket									
								Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100%	100%	258.887.045.400	100%	279.344.143.600	100%	330.081.657.600	100%	363.788.500.000	100%	373.588.500.000	100%	1.605.689.846.600							
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM					30 jenis	258.887.045.400	30 jenis	279.344.143.600	30 jenis	330.081.657.600	30 jenis	363.788.500.000	30 jenis	373.588.500.000	30 jenis	1.604.989.846.600				
		1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat tercover iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP kelas 3	12 bulan	12 bulan	10.405.144.800	12 bulan	10.405.144.800	235.370 jiwa	36.336.081.600	235.370 jiwa	36.336.081.600	235.370 jiwa	36.336.081.600	235.370 jiwa	129.818.534.400	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)				
								Jumlah masyarakat tercover bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP kelas 3	12 bulan	12 bulan	241.673.445.200	12 bulan	241.673.445.200	567.592 jiwa	241.673.445.200	567.592 jiwa	241.673.445.200	567.592 jiwa	241.673.445.200	567.592 jiwa	1.208.367.226.000	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)				
								Jumlah masyarakat tercover layanan kesehatan Kota Bekasi berbasis NIK	12 bulan	12 bulan	1.401.330.400	12 bulan	13.265.553.600	258.520 jiwa	39.572.130.800	258.520 jiwa	39.572.130.800	258.520 jiwa	39.572.130.800	258.520 jiwa	133.383.276.400	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	BANPR OV JABAR				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis layanan dalam rangka Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1 jenis	350.000.000	1 jenis	350.000.000	1 jenis					
		1	02	02	2,04	03	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen FS dan masterplan RSUD Kelas D							2 RSUD	350.000.000	2 RSUD	350.000.000	4 RSUD	700.000.000	Bidang Yankes	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
								Jumlah aplikasi perijinan online serta pengembangannya							1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi					
								Jumlah pembinaan rumah sakit sayang ibu dan bayi							1 Kali		1 Kali		1 Kali					
								Jumlah sosialisasi SP2RS petugas rekam medis							1 Kali		1 Kali		1 Kali					
								Jumlah kegiatan evaluasi sistem rujukan							1 Kali		1 Kali		1 Kali					
								Jumlah klinik utama yang dibina							40 klinik		40 klinik		40 klinik					
								Jumlah RSUD Kelas D milik Pemerintah yang dibina							4 RSUD		4 RSUD		4 RSUD					
								Jumlah pembinaan ketersediaan pelayanan intensif di rumah sakit							2 Kali		2 Kali		2 Kali					
		1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit Bantargebang	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan kefarmasian, pelayanan spesialisik di RSUD Bantargebang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16.086.205.650	12 bulan	16.086.205.650	12 bulan	41.172.411.300	RSUD KELAS D BANTAR GEBANG	Bantargebang, Bantargebang	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jatisampurna	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan kefarmasian, pelayanan spesialistik di RSUD Jatisampurna	12 bulan	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	4.000.000.000	12 bulan	8.420.636.750	12 bulan	8.420.636.750	25.841.273.500	RSUD KELAS D JATISAMPUR NA	Jati Sampurna, Jati Jampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pondokgrde	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan kefarmasian, pelayanan spesialistik di RSUD Pondokgede	12 bulan	12 bulan	2.407.125.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	4.500.000.000	12 bulan	7.000.000.000	12 bulan	7.700.000.000	25.107.125.000	RSUD Kelas D PONDOK GEDE	Jati Waringin, Pondok Gede	Pendap atan Asli Daerah (P A D)	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit Telukpucung	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan kefarmasian, pelayanan spesialistik di RSUD Telukpucung		N/A	0	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan		12 bulan	7.000.000.000	12 bulan	7.700.000.000	18.200.000.000	RSUD Kelas D TELUKPU CUN G	Teluk Pucung, Bekasi Utara	Pendap atan Asli Daerah (P A D)	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit Medan Satria	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan kefarmasian, pelayanan spesialistik di RSUD Medansatria		N/A	0	N/A	0	N/A	0	12 bulan	7.000.000.000	12 bulan	7.700.000.000	14.700.000.000	RSUD Kelas D MEDAN SATRIA	Teluk Pucung, Bekasi Utara	Pendap atan Asli Daerah (P A D)	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
							Operasional Pelayanan Rumah Sakit Baru	Jumlah bulan ketersediaan operasional untuk pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan kefarmasian,		N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	12 bulan	7.700.000.000	12 bulan	7.700.000.000	RSUD Kelas D BARU	Teluk Pucung, Bekasi Utara	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Presentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan			100%	0	100%	0	100%	0	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	500.000.000			
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	200.000.000	30 jenis	300.000.000	30 jenis	500.000.000			
		1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil						48 PKM	200.000.000	56 PKM	300.000.000	56 PKM	500.000.000	56 PKM	500.000.000	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan ibu hamil							48 PKM		56 PKM		56 PKM		56 PKM		Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Jumlah Puskesmas menggunakan e-kohort bagi fasilitas kesehatan							48 PKM		48 PKM		56 PKM		56 PKM		Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Adanya laporan hasil pengkajian kasus kematian ibu dan bayi							1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	0	1 Laporan	0	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
									Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						Presentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100%	0	100%	0	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	800.000.000			
		1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	30 jenis		30 jenis		30 jenis	200.000.000	30 jenis	300.000.000	30 jenis	300.000.000	800.000.000			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
									Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)							Tahun-5 (Tahun 2023)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
		02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Puskesmas poned yang dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	12 PKM	200.000.000	15 PKM	300.000.000	20 PKM	300.000.000	20 PKM	800.000.000		Harapan Mulya, Medan Satria	PAD	
							Jumlah rumah sakit ponek yang dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	3 RSUD		3 RSUD		4 RSUD		4 RSUD	0				
							Jumlah RS yang melaksanakan laporan MPDN	N/A	N/A	N/A	N/A	42 RS		45 RS		45 RS		45 RS	0				
							Jumlah Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan ibu bersalin	42 Pkm	42 Pkm		42 Pkm	42 Pkm		47 Pkm		48 Pkm		56 Pkm	0				
							Presentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	0	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	500.000.000	100%	1.100.000.000				
		1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM	30 jenis	0	30 jenis	200.000.000	30 jenis	200.000.000	30 jenis	200.000.000	30 jenis	500.000.000	30 jenis	1.100.000.000				
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	42 PKM	42 PKM		42 PKM	200.000.000	47 pkm	200.000.000	48 pkm	200.000.000	56 pkm	500.000.000	56 pkm	1.100.000.000	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Jumlah peserta orientasi SHK bagi bidan puskesmas									56 orang		56 orang					
							Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pemeriksaan SHK									415 bayi		415 bayi					

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket	
									Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)							
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target
						Presentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000							
		1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	150.000.000	30 jenis	150.000.000	30 jenis	100.000.000	30 jenis	100.000.000						
		1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah puskesmas melaksanakan kelas ibu balita	42 Pkm	42 Pkm	0	42 Pkm	150.000.000	47 Pkm	150.000.000	48 Pkm	100.000.000	56 Pkm	100.000.000	56 Pkm	500.000.000	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan balita	42 Pkm	42 Pkm	0	42 Pkm		47 Pkm		48 Pkm		56 Pkm		56 Pkm					
							Persentase warga negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	100.000.000	100%	200.000.000		300.000.000				
		1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	100.000.000	30 jenis	200.000.000		300.000.000				
		1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah puskesmas yang melaksanakan posyandu remaja							25 PKM	100.000.000	25 PKM	200.000.000	25 PKM	300.000.000	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
							Jumlah Puskesmas PKPR								35 PKM		35 PKM		35 PKM					
							Jumlah model sekolah/madrasah sehat yang dibina								12 Sekolah		12 Sekolah		12 Sekolah					

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
									Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)							Tahun-5 (Tahun 2023)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
						Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	42 Pkm	42 Pkm		42 Pkm		47 Pkm		48 Pkm		56 Pkm		56 Pkm					
						Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	24.100.000	100%	26.510.000	100%	50.610.000				
		1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	24.100.000	30 jenis	26.510.000	30 jenis	50.610.000			
		1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Posbindu PTM memberikan pelayanan screening						96 Posbindu	24.100.000	96 Posbindu	26.510.000	96 Posbindu	50.610.000	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
						Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih deteksi kanker payudara dan kanker serviks							96 orang		96 orang		96 orang						
						Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan pada usia produktif	42 Pkm	42 Pkm		42 Pkm		47 Pkm		48 Pkm		56 Pkm		56 Pkm					
						Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	0	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	432.000.000	100%	475.200.000	100%	1.507.200.000				
		1	02	02	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	300.000.000	30 jenis	300.000.000	432.000.000	30 jenis	475.200.000	30 jenis	1.507.200.000				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah puskesmas santun lansia			34 Pkm	300.000.000	34 Pkm	300.000.000	34 Pkm	432.000.000	34 Pkm	475.200.000	34 Pkm	1.507.200.000	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
								Jumlah buku kesehatan lanjut usia			1000 buku		1000 buku		1000 buku		1000 buku		1000 buku					
								Jumlah Posbindu Lansia yang dibina			686 posbindu		686 posbindu		686 posbindu		686 posbindu		686 posbindu					
								Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	42 Pkm	42 Pkm	42 Pkm		47 Pkm		48 Pkm		56 Pkm		56 Pkm					
								Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	0	100%	0	100%	0	100%	45.118.000	100%	49.629.800	100%	94.747.800			
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	45.118.000	30 jenis	49.629.800	30 jenis	94.747.800			
		1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Puskesmas memiliki dokter dan pengelola program puskesmas yang terlatih deteksi penderita hipertensi							48 Pkm	45.118.000	56 Pkm	49.629.800	56 Pkm	94.747.800	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
								Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	42 Pkm	42 Pkm	42 Pkm		47 Pkm		48 Pkm		56 Pkm		56 Pkm					
								Persentase warga negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	0	100%	0	100%	0	100%	45.148.000	100%	49.662.800	100%	94.810.800			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	45.148.000	30 jenis	49.662.800	30 jenis	94.810.800			
		1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Puskesmas memiliki dokter dan pengelola program puskesmas yang terlatih deteksi penderita diabetes melitus								48 PKM	45.148.000	56 Pkm	49.662.800	56 Pkm	94.810.800	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
								Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	42 Pkm	42 Pkm		42 Pkm		47 Pkm		48 Pkm		56 Pkm		56 Pkm				
								Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	400.000.000			
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	200.000.000	30 jenis	200.000.000	30 jenis	400.000.000			
		1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Puskesmas memiliki dokter dan pengelola program puskesmas yang terlatih deteksi penderita TBC								48 PKM	200.000.000	56 PKM	200.000.000	56 PKM	400.000.000	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	DAK FISIK
								Jumlah kecamatan memiliki SK PPM TBC Tingkat Kecamatan								12 Kec		12 Kec		12 Kec				
								Jumlah SK penetapan Fasilitas Kesehatan rujukan TB RO di Kota Bekasi								1 SK		1 SK		1 SK				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
							Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan pada penderita TBC	42 Pkm	42 Pkm		42 Pkm		47 Pkm		48 Pkm		56 Pkm		56 Pkm		Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	DAK NON FISIK/B OK	
							Persentase Warga Negara gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	0	100%	0	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000				
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	50.000.000	30 jenis	50.000.000	30 jenis	100.000.000			
		1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Puskesmas mendapatkan Sosialisasi pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa bagi dokter dan pemegang program								47 PKM	50.000.000	56 PKM	50.000.000	56 PKM	100.000.000	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
							Jumlah panti mendapatkan Edukasi pemantauan minum obat pasien ODGJ								7 panti		7 panti		7 panti					
							Jumlah Evakuasi pasien ODGJ berat ke RS Rujukan								50 pasien		50 pasien		50 pasien					
							Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	42 Pkm	42 Pkm		42 Pkm		47 Pkm		48 Pkm		56 Pkm		56 Pkm					
							Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	0	100%	0	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	3.000.000.000				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	1.000.000.000	30 jenis	1.000.000.000	30 jenis	1.000.000.000	30 jenis	3.000.000.000			
		1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah ODHA mendapatkan pemiksaan viraload						320 orang	1.000.000.000	320 orang	1.000.000.000	320 orang	1.000.000.000	320 orang	3.000.000.000	Bidang P2P	Harapan Mulya, Medan Satria	DAK FISIK
								Jumlah BHP pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis						24.250 buah		24.250 buah		24.250 buah		24.250 buah				
								Jumlah Nakes yang terlatih Program HIV (dokter, perawat, laboratoriu, farmasi dan RR)								20 orang		20 orang		20 orang				
								Jumlah kecamatan membuat SK Tim HIV Tingkat Kecamatan								12 Kec		12 Kec		12 Kec				
								Persentase institusi yang memenuhi syarat kesehatan	62%	62%	0	65,00%	450.000.000	65%	200.000.000	72%	1.750.000.000	75%	980.000.000	75%	3.380.000.000			
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	450.000.000	30 jenis	200.000.000	30 jenis	1.750.000.000	30 jenis	980.000.000	30 jenis	3.380.000.000			
		1	02	02	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Sekolah sehat dengan strata paripurna per kecamatan yang dibina				4 sekolah	250.000.000	4 sekolah	200.000.000	4 sekolah	200.000.000	4 sekolah	200.000.000	4 sekolah	850.000.000	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
							Jumlah kelurahan yang dibina Kota Sehat			1 Kel		12 kelurahan		12 kelurahan		12 kelurahan		12 kelurahan						
		1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah TTU yang dibina		0	12 Sekolah, 10 Faskes, 2 Hotel	200.000.000			87 TTU	1.550.000.000	87 TTU	780.000.000	87 TTU	2.530.000.000	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
							Jumlah pilar STBM yang dilaksanakan			1 pilar		1 pilar		1 pilar		1 pilar		1 pilar						
							Jumlah petugas/pengelola kolam renang yang memahami Higiene sanitasi kolam renang							40 orang		40 orang		40 orang						
							Jumlah petugas/pengelola hotel yang memahami Higiene sanitasi hotel							40 orang		40 orang		40 orang						
							Jumlah petugas/pengusaha pemberantasan hama/pest control yang memahami pengelolaan pemberantasan hama yang sesuai standar							30 orang		30 orang		30 orang		0				
							Jumlah petugas/pengelola pasar yang memahami penyelenggaraan pasar sehat							20 orang		20 orang		20 orang		0				
							Jumlah guru UKS yang memahami kesehatan lingkungan sekolah							50 orang		50 orang		50 orang		0				
							Jumlah petugas pengelola fasilitas kesehatan yang memahami pengelolaan Limbah B3							150 orang		150 orang		150 orang		0				
							Jumlah petugas kesling puskesmas yang memahami IKL berbasis aplikasi							48 orang		48 orang		48 orang		0				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket	
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Jumlah TPM yang dibina								100 TPM		100 TPM		100 TPM	0				
				Jumlah petugas puskesmas yang memahami penggunaan sanitarian kit								100 orang		100 orang		100 orang	0				
				Jumlah uji laboratorium sampel makanan dan minuman di TPM								50 sampel		50 sampel		50 sampel	0				
				Jumlah petugas puskesmas yang memahami e-monev Higiene Sanitasi Pangan								50 orang		50 orang		50 orang	0				
				Jumlah pengelola depot air minum yang memahami HSP								100 orang		100 orang		100 orang	0				
				Jumlah sampel air minum yang diperiksa di laboratorium								70 sampel		70 sampel		70 sampel	0				
				Jumlah rumah yang dilakukan survey sanitasi								20.000 rumah				20.000 rumah	0				
				Prevalensi balita status gizi stunting	12,16%	10,69%	10,20%	10,00%				9,80%		9,50%		9,50%					
						0		0			1.993.527.000		2.000.000.000		2.000.000.000		5.993.527.000				
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM				30 jenis		30 jenis		30 jenis		30 jenis			
						0		0			1.993.527.000		2.000.000.000		2.000.000.000		5.993.527.000				
		1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta orientasi tata laksana anak gizi buruk					42 orang		42 orang		42 orang		Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
												1.993.527.000		2.000.000.000		2.000.000.000		5.993.527.000			
		1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan teknis surveilans gizi					42 orang		42 orang		42 orang				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket	
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)							
										Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP						
		1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah pendampingan surveilans gizi							42 orang		42 orang		42 orang						
		1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah validasi laporan gizi							2 kali		2 kali		2 kali						
		1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah evaluasi program gizi							2 kali		2 kali		2 kali						
								Jumlah Perwal penurunan stunting											1 perwal						
								Jumlah kelurahan membentuk kelompok mendukung penurunan stunting							4 kelurahan		4 kelurahan		12 kelurahan						
								Jumlah kecamatan melaksanakan rembuk stunting							12 Kec		12 Kec		12 Kec						
								Jumlah lokasi pelacakan stunting							12 Lokasi		12 Lokasi		12 Kec						
								Jumlah sekolah melaksanakan pemeriksaan Hb							21 sekolah		21 sekolah		63 sekolah						
								Jumlah wilayah pemician stunting							10 wilayah		10 wilayah		10 wilayah						
								Jumlah balita gizi buruk/sangat kurus mendapatkan makanan pemulihan							107 orang		107 orang		107 orang						
								Jumlah petugas kesehatan mampu melaksanakan integrasi STBM							32 orang		32 orang		96 orang						
								Jumlah kader kesehatan mampu melakukan antropometri							497 orang		497 orang		1491 orang						
								Persentase Puskesmas terakreditasi	47,92%	64,29%	71,43%	71,43%	83%	84,61%	3.266.219.000	3.589.864.000	2.356.619.000	3.000.000.000	3.000.000.000	84,61%	15.212.702.000				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	3.266.219.000	30 jenis	3.589.864.000	30 jenis	2.356.619.000	30 jenis	3.000.000.000	30 jenis	3.000.000.000	15.212.702.000				
		1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas terakreditasi	20 PKM	28 PKM	3.266.219.000	37 PKM	3.589.864.000	41 PKM	1.210.950.000	42 PKM	1.500.000.000	47 PKM	1.500.000.000	47 PKM	11.067.033.000	Bidang Yankes	Harapan Mulya, Medan Satria	DAK NON FISIK/B OK
								Jumlah Labkesda terakreditasi				1 Lab							0					
		1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan dalam Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0	0	1 Jenis	1.145.669.000	1 Jenis	1.500.000.000	1 Jenis	1.500.000.000	1 Jenis	1.500.000.000	4.145.669.000				
		1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang didampingi dalam persiapan akreditasi dan reakreditasi				23 PKM	1.145.669.000	20 PKM	1.500.000.000	20 PKM	1.500.000.000	20 PKM	1.500.000.000	4.145.669.000				
								Jumlah Puskesmas baru memiliki dokumen studi kelayakan				4 PKM		10 PKM				14 PKM						
								Persentase RS terakreditasi		100%	,	100%	,	100%	,	100%	,	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000			
		1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan UKP dan UKM		30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	0	30 jenis	2.000.000.000	30 jenis	2.000.000.000			
		1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas D Terakreditasi										4 RSUD	.000.000.000	4 RSUD	.000.000.000			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket	
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						Target
		1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis layanan dalam Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1 Jenis	1.000.000.000	1 Jenis	1.000.000.000					
		1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah RS Kelas D yang didampingi dalam persiapan akreditasi dan reakreditasi									4 RSUD	1.000.000.000	4 RSUD	1.000.000.000					
							Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	60%	60%	30.800.000.000	60%	24.600.000.000	60%	26.600.000.000	60%	43.200.000.000	60%	28.500.000.000	60%	188.700.000.000					
		1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah jenis fasilitas pelayanan kesehatan	12 jenis	12 jenis	30.800.000.000	12 jenis	24.600.000.000	12 jenis	26.600.000.000	12 jenis	43.200.000.000	12 jenis	28.500.000.000	12 jenis	188.700.000.000				
		1	02	02	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah gedung Instalasi Farmasi yang diperluas			7.000.000.000		7.000.000.000	1 DED	7.500.000.000	1 Paket	9.000.000.000	7.000.000.000	1 Paket	72.500.000.000					
								Jumlah Sarana Puskesmas			1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0					
								Jumlah Sarana Labkesda						1 Paket		1 Paket		1 Paket	1 Paket	0					
								Jumlah Sarana Instalasi Farmasi						1 Paket		1 Paket		1 Paket	1 Paket	0					
		1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas memiliki IPAL Puskesmas memenuhi syarat	42 PKM	42 PKM	12.600.000.000	42 PKM	12.600.000.000	47 PKM	14.100.000.000	48 PKM	16.700.000.000	16.800.000.000	2.000.000.000	56 PKM	58.000.000.000				

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
												1 Unit			1 Unit							
												1 paket			1 paket							
												1 Paket			1 Paket		0					
												1 Paket			1 Paket		0					
		1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang dilingkungan dinas kesehatan UPTD Puskesmas dan Jaringannya	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		58.200.000.000	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
								Jumlah alat kesehatan/alat penunjang Labkesda							1 Paket		1 Paket		0			
								Jumlah alat kesehatan/alat penunjang Instalasi Farmasi							1 Paket		1 Paket		0			
		1	02					Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan RSUD Kelas D	60%		60%		60%		60%		60%		263.000.000.000			
		1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah jenis fasilitas pelayanan kesehatan	12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		263.000.000.000			
		1	02	02	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana RSUD Bantargebang	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		115.000.000.000			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket										
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)																
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp															
							Jumlah Sarana RSUD Jatisampurna		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket																	
							Jumlah Sarana RSUD Pondokgede		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket																	
							Jumlah Sarana RSUD Telukpucung						1 Paket		1 Paket		1 Paket																	
							Jumlah Sarana RSUD Medansatria								1 Paket		1 Paket																	
							Jumlah Sarana RSUD Baru								1 Paket		1 Paket																	
		1	02	02	2,01	14	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung RSUD Kelas D Bantargebang							1 paket		1 paket		5.000.000.000		5.000.000.000			10.000.000.000										
							Jumlah prasarana dan pendukung RSUD Kelas D Pondokgede																											
							Jumlah prasarana dan pendukung RSUD Kelas D Jatisampurna																											
							Jumlah prasarana dan pendukung RSUD Kelas D Telukpucung																											
							Jumlah prasarana dan pendukung RSUD Kelas D Medansatria																											
							Jumlah prasarana dan pendukung RSUD Kelas D Baru																											
		1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat kesehatan/Alat Penunjang RSUD Kelas D Bantargebang		1 paket								17.000.000.000		17.000.000.000			17.000.000.000			27.000.000.000		47.000.000.000		125.000.000.000				
							Jumlah Alat kesehatan/Alat Penunjang RSUD Kelas D Pondokgede		1 paket		1 paket		1 Paket		1 paket		1 paket																	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket	
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
				Jumlah Alat kesehatan /Alat Penunjang RSUD Kelas D Jatisampurna		1 paket		1 paket		1 Paket		1 paket		1 paket		1 paket					
				Jumlah Alat kesehatan?Alat Penunjang RSUD Kelas D Telukpucung								1 paket		1 paket		1 paket					
				Jumlah Alat kesehatan/Alat Penunjang RSUD Kelas D Medansatria										1 paket		1 paket					
				Jumlah Alat kesehatan/a;at penunjang RSUD Kelas D Baru										1 paket		1 paket					
		1	02	02	2,01	14	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS melaksanakan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		4 RSUD	4.000.000.000	4 RSUD	4.000.000.000	5 RSUD	5.000.000.000	5 RSUD	13.000.000.000				
				Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	42	42	0	43	0	47	12.000.000.000	52	62.000.000.000	56	4.000.000.000	56	78.000.000.000				
		1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah jenis fasilitas pelayanan kesehatan	12 jenis	12 jenis	0	12 jenis	0	12 jenis	12.000.000.000	12 jenis	12 jenis	78.000.000.000			
		1	02	02	2,01	02	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Puskesmas Jaticempaka	0			1 unit	8.000.000.000	58.000.000.000			66.000.000.000	Jaticempaka, Pondokgede	Jaticempaka, Pondokgede	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Terbangunnya Puskesmas Jatimelati	0							1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatimelati	Jatimelati, Pondokmelati	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya Puskesmas Jatimurni	0							1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatimurni	Jatimurni, Pondokmelati	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya Puskesmas Jatirangga	0							1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatirangga	Jatirangga, Jatisampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya Puskesmas Jatiraden	0							1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatiraden	Jatiraden, Jatisampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya Puskesmas Jatisari	0							1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatisari	Jatisari, Jatiasih	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya Puskesmas Jatirasa	0							1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatirasa	Jatirasa, Jatiasih	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya Puskesmas Sepanjangjaya	0							1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Sepanjangjaya	Sepanjang jaya, Rawalumbu	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya Puskesmas Jatisampurna								1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatisampurna	Jatisampurna, Jatisampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Terbangunnya Puskesmas Pondokgede								1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatisampurna	Jatiwaringin , Pondok Gede	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya Puskesmas Jakasetia								1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatisampurna	Jaka Setia, Bekasi Selatan	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya Puskesmas Cikiwul						1 unit	4.000.000.000						4.000.000.000	Jatisampurna	Jaka Setia, Bekasi Selatan	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya Puskesmas Cimuning						1 unit	4.000.000.000						4.000.000.000	Jatisampurna	Jaka Setia, Bekasi Selatan	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Lanjutan pembangunan Puskesmas Mustikasari								1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatisampurna	Mustika Sari, Mustika Jaya	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Rehab berat puskesmas Bintara								1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatisampurna	Bintara, Bekasi Barat	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Terbangunnya gedung PONED Puskesmas Pejuang								1 unit	2.000.000.000				2.000.000.000	Pejuang	Pejuang, Medansatri a	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Rehab berat Puskesmas Jatimakmur								1 unit	4.000.000.000				4.000.000.000	Jatisampurna	Jati Makmur, Pondok Gede	Pendap atan Asli Daerah (P A D)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1	02	02	2,01	02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rehab Puskesmas					1 unit	4.000.000.000	1 unit	4.000.000.000	1 unit	4.000.000.000		12.000.000.000				
		1	02	02			Rehab Puskesmas Jati Ranggon berupa pemasangan Kanopi, Pemasangan Pagar, Pemasangan Paving Block Dan peningkatan fungsi saluran Air												0					
							Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)		34%	11%	0	22%	0	22%	50.000.000	22%	50.000.000	23%	50.000.000	100%	150.000.000			
		1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah jenis fasilitas pelayanan kesehatan	12 jenis	12 jenis	0	12 jenis	0	12 jenis	50.000.000	12 jenis	50.000.000	12 jenis	50.000.000	12 jenis	150.000.000			
							Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pembentukan Puskesmas PONED	10 unt	10 unit		5 unit		5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	150.000.000			
		1	02	02			Persentase ketersediaan gedung RS Type D			33.33%	30.000.000.000	50%	0	50%	30.000.000.000	66.67%	40.000.000.000	100%	30.000.000.000	100%	130.000.000.000			
		1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumla jenis fasilitas pelayanan kesehatan	12 jenis	12 jenis	30.000.000.000	12 jenis	0	12 jenis	30.000.000.000	12 jenis	40.000.000.000	12 jenis	30.000.000.000	12 jenis	130.000.000.000			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1	02	02	2,01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung RSUD Kelas D yang dibangun	3 RSUD	3 RSUD	30.000.000.000	1 RSUD			10.000.000.000	1 RSUD	10.000.000.000	1 RSUD	10.000.000.000	6 RSUD	60.000.000.000	Yankes	Mustika Jaya, Mustika Jaya	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
		1	02	02	2,01	01	Pengembangan rumah sakit	Jumlah rumahsakit meningkat klasifikasinya				1 RSUD	10.000.000.000	2 RSUD	20.000.000.000	1 RSUD	10.000.000.000	2 RSUD	40.000.000.000					
		1	02	02	2,01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang direhab				3 RSUD	10.000.000.000	3 RSUD	10.000.000.000	4 RSUD	10.000.000.000		30.000.000.000	RSUD				
		1	02	02				Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan RS		100%	8.000.000.000	100%	8.900.000.000	100%	8.500.000.000	100%	11.500.000.000	100%	11.800.000.000		48.700.000.000			
		1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan	12 jenis	12 jenis	8.000.000.000	12 jenis	8.900.000.000	12 jenis	8.500.000.000	12 jenis	11.500.000.000	12 jenis	11.800.000.000		48.700.000.000			
		1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat/vaksin untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Bantargebang	1 Paket	1 Paket	8.000.000.000	1 Paket	8.900.000.000	1 Paket	8.500.000.000	1 Paket	11.500.000.000	1 Paket	11.800.000.000	1 Paket	48.700.000.000	RSUD KELAS D BANTAR GEBANG	Bantargebang, Bantargebang	Pendapatan Asli Daerah (P A D)
								Jumlah obat/vaksin untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Pondok Gede	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			RSUD Kelas D PONDOK GEDE	Jati Waringin, Pondok Gede	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket				
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	RP							
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP							
				Jumlah obat/vaksin untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Jatisampurna	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		RSUD KELAS D JATISAMPUR NA	Jati Sampurna, Jati Sampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)				
				Jumlah obat/vaksin untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Telukpucung								1 paket		1 paket		1 paket		RSUD KELAS D JATISAMPUR NA	Jati Sampurna, Jati Sampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)				
				Jumlah obat/vaksin untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Medansatria	1 Tahun									1 paket		1 paket		RSUD KELAS D JATISAMPUR NA	Jati Sampurna, Jati Sampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)				
				Jumlah untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Baru										1 paket		1 paket		RSUD KELAS D JATISAMPUR NA	Jati Sampurna, Jati Sampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)				
				Jumlah obat/vaksin untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Instalasi Farmasi	Mustika Jaya, Mustika Jaya	Pendap atan Asli Daerah (P A D)				
		1	02	02	2,01	16	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan medis habis pakai untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Bantargebang	1 Paket	1 Paket	6.000.000.000	1 Paket	14.900.000.000	1 Paket	15.500.000.000	1 Paket	17.500.000.000	1 Paket	18.800.000.000	1 Paket	72.700.000.000	RSUD KELAS D BANTAR GEBANG	Bantargeba ng, Bantargeba ng	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
				Jumlah bahan medis habis pakai untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Pondok Gede	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		RSUD Kelas D PONDOK GEDE	Jati Waringin, Pondok Gede	Pendap atan Asli Daerah (P A D)				
				Jumlah bahan medis habis pakai untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Jatisampurna	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		RSUD KELAS D JATISAMPUR NA	Jati Sampurna, Jati Sampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)				
				Jumlah bahan medis habis pakai untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Telukpucung										1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		RSUD KELAS D JATISAMPUR NA	Jati Sampurna, Jati Sampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
												1 paket		1 paket		1 paket		RSUD KELAS D JATISAMPUR NA	Jati Sampurna, Jati Sampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)		
														1 paket		1 paket		RSUD KELAS D JATISAMPUR NA	Jati Sampurna, Jati Sampurna	Pendap atan Asli Daerah (P A D)		
						1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		Instalasi Farmasi	Mustika Jaya, Mustika Jaya	Pendap atan Asli Daerah (P A D)		
								1 paket	1 paket		1 paket			1 paket		1 paket		Instalasi Farmasi	Mustika Jaya, Mustika Jaya	Pendap atan Asli Daerah (P A D)		
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	70%	70%	80%	100%	100%	38.378.984.000	100%	48.198.499.200	100%	52.964.349.120	100%	140.041.832.320			
		1	02	03	2,03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumah jenis layanan Sumberdaya Manusia Kesehatan				1 Jenis	1 Jenis	37.878.984.000	1 Jenis	47.658.499.200	1 Jenis	52.424.349.120	1 Jenis	137.961.832.320			
		1	02	03	2,03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah bulan pemenuhan gaji/honor SDM					37.878.984.000	12 bulan	47.658.499.200	12 bulan	52.424.349.120	12 bulan	137.961.832.320	Sekretariat	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendap atan Asli Daerah (P A D)
		1	02	03	2,04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis layanan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan			1 jenis	1 jenis	1 jenis	500.000.000	1 jenis	500.000.000	1 jenis	500.000.000	1 jenis	2.000.000.000			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1	02	03	2,04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan terlatih PONEK dan PONEK			60 orang	500.000.000	60 orang	500.000.000	60 orang	500.000.000	60 orang	500.000.000	60 orang	2.000.000.000	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
								Jumlah Nakes teladan di Kota Bekasi			9 orang		9 orang		9 orang		9 orang							
								Jumlah fasyankes mengikuti uji kompetensi tenaga Kesehatan			45 Faskes		45 Faskes		45 Faskes		45 Faskes							
								Jumlah SDM mengikuti pelatihan teknis dan fungsional					50 orang		50 orang		150 orang							
		1	02	03	2,05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP		0	0	0	2 jenis	40.000.000	2 jenis	40.000.000	2 jenis	80.000.000						
		1	02	03	2,05	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah bulan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan					12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	40.000.000	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)			
		1	02	03	2,05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah bulan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan					12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	40.000.000	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)			
		1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	58%	61,9%	0	60%	62%	8.200.000.000	64%	26.500.000.000	65%	26.500.000.000	65%	61.200.000.000				
		1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor		0	0	1 Jenis	200.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000		50.200.000.000					

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket				
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)										
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
		1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan	N/A					2 kebijakan	200.000.000	2 kebijakan	25.000.000.000	2 kebijakan	25.000.000.000	2 kebijakan	50.200.000.000							
								Jumlah kelurahan memiliki kebijakan PHBS						5 Kel		5 Kel		5 Kel		5 Kel	0							
								Jumlah Poskestren yang dibina						15 poskestren		15 poskestren		15 poskestren		15 poskestren	0							
								Jumlah kelurahan siaga aktif yang dibina						56 kel		56 kel		56 kel		56 kel	0							
								Jumlah kader kesehatan yang dibina						224 orang		224 orang		224 orang		224 orang	0							
								Jumlah MoU dengan Dunia Usaha yang menyelenggarakan CSR kesehatan						1 MOU		1 MOU		1 MOU		1 MOU	0							
								Jumlah PKS dengan Ormas yang memanfaatkan sumber daya yang mendukung kesehatan						5 ormas		5 ormas		5 ormas		5 ormas	0							
								Jumlah Puskesmas yang memiliki konseling berhenti merokok						12 Puskesmas		12 Puskesmas		12 Puskesmas		12 Puskesmas	0							
								Jumlah jenis barang hibah kepada masyarakat						3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis			POKIR	KALIABANG TENGAH, BEKASI UTARA	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
		1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan promotif dan preventif						8.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		11.000.000.000								

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kelurahan ODF					1 Kel	8.000.000.000	1 Kel	1.500.000.000	1 Kel	1.500.000.000	3 Kel	11.000.000.000	Bidang Kesmas	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
								Jumlah Puskesmas melakukan penyuluhan dan melaksanakan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	42 PKM	42 PKM	42 PKM	47 PKM	48 PKM	56 PKM	56 PKM									
								Jumlah kampanye Germas					12 kali		12 kali		36 kali							
								Jumlah tema pesan media edukasi kesehatan					12 tema		12 tema		12 tema							
								Frekuensi sosialisasi dan edukasi kesehatan menggunakan mobil Promkes					12 kali		12 kali		36 kali							
		1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							100.000.000		150.000.000		150.000.000		400.000.000				
								Persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	90%	90%	91,00%	91,72%	93%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	100.000.000						
		1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah jenis layanan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					2 jenis	50.000.000	2 jenis	50.000.000	2 jenis	100.000.000						

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
										Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		1	02	04	2,01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana kefarmasian yang terdata dan dibina							75 Sarana	50.000.000	75 Sarana	50.000.000	150 Sarana	100.000.000	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
		1	02	04	2,01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah ijin rekomendasi kefarmasian yang diterbitkan sesuai standar							75 Sarana	50.000.000	75 Sarana	50.000.000	150 Sarana	100.000.000	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
								Persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300.000.000				
		1	02	04	2,06		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah jenis layanan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh		0	0	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	300.000.000					
		1	02	04	2,06	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah peserta penyuluhan keamanan pangan				128 Sarana	128 Sarana	128 Sarana	384 sarana	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendapatan Asli Daerah (P A D)		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan	Sasaran	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan (PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019)	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Ket					
						Tahun-1 (Tahun 2019)		Tahun-2 (Tahun 2020)		Tahun-3 (Tahun 2021)		Tahun-4 (Tahun 2022)		Tahun-5 (Tahun 2023)		Target	Rp								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
										200 Sarana		200 Sarana		200 Sarana		400 Sarana									
										128 Sertifikat		128 Sertifikat		128 Sertifikat		384 sarana									
										200 Sarana		200 Sarana		200 Sarana		400 Sarana									
		1	02	04	2,06					0		0		0		1 jenis		1 jenis		1 jenis		200.000.000			
		1	02	04	2,06	02	Pemeriksaan post market pada produk makanan- minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	Jumlah uji laboratorium pangan industri rumah tangga post market						100 sampel	100.000.000	100 sampel	100.000.000	200 sampel	200.000.000	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendap atan Asli Daerah (P A D)			
								Jumlah pengawasan pangan post market bebas dari bahan berbahaya pangan						100 sampel		100 sampel		200 sampel	0	Bidang SDK	Harapan Mulya, Medan Satria	Pendap atan Asli Daerah (P A D)			
JUMLAH										768.396.347.325		706.555.950.059		790.099.242.369		931.732.917.833		892.311.589.616		4.124.096.047.202					

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berkaitan dengan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 maka Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Visi Kota Bekasi yaitu “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, Dan Ihsan”. Sedangkan untuk Misi Kota Bekasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah Misi yang ke 4 yaitu “Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif, dan Inovatif”.

Berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

No	Program	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Pada Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	58%	58%	60%	62%	64%	65%	65%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

No	Program	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Pada Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prevalensi Balita Status Gizi Stunting	12,16%	10,69%	10,20%	10%	9,8%	9,5%	9,5%
		persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	62%	62%	65%	68%	72%	75%	75%
		Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	42 Puskesmas	42 Puskesmas	45 Puskesmas	49 Puskesmas	52 Puskesmas	56 Puskesmas	56 Puskesmas
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	90,23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	87,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	95,69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	59,62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

No	Program	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Pada Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	94,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	38,14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	84,49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	13,30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	30,49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	98,38%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

No	Program	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Pada Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	75,06%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase PKM Terakreditasi	47,62%	64,29%	71,43%	83,33%	83,33%	83,33%	83,33%
		Persentase RS Terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan RS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	34%	11%	22%	22%	22%	23%	100%
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	90%	90%	91%	92%	93%	95%	95%
		persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	70%	70%	80%	100%	100%	100%	100%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	

VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut Indikator Kinerja yang diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kota Bekasi selama kurun waktu 5 tahun. Keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi tergantung pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam bidang kesehatan.

Demikian dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini dibuat, semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan, khususnya Pembangunan Bidang Kesehatan di Kota Bekasi.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI**



TANTI ROHOILAWATI, SKM, M.Kes
Pembina Tk.1
NIP. 19641028 198803 2 006

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kepala Bagian Hukum	